

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANAH LAUT

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari,       Maret 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut.**



**Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si**  
NIP. 19680916 199010 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terdiri 3 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan Kepala Bidang Komunikasi. Sedangkan Esselon IV sejumlah 8 Jabatan ( 2 Kasubbag dan 6 Kasi).

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Visi (Tanah Laut yang Berinteraksi) dan Misi Bupati Tanah Laut, **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 berorientasi pada sasaran Meningkatnya pengembangan dan

pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi; Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi); dan Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD. Strategi yang disusun untuk mengembangkan komunikasi dan informatika dalam rangka mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait maupun perguruan tinggi dalam hal pengembangan e-government; Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik dengan sistem data terintegrasi; Meningkatkan cakupan media informasi publik; Melakukan kerjasama kemitraan dan hubungan dengan media komunikasi; Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah; Meningkatkan layanan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan dokumen; Menyediakan data statistik sektoral daerah; Pembangunan pusat data yang terintegrasi dengan SKPD. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program Pengembangan Data/Informasi; Program Pengelolaan Komunikasi Publik; dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan e-Government, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengacu pada Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengikuti Piloting Pelaksanaan SPBE guna meningkatkan nilai/indeks SPBE. Nilai/indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 ini sebesar **3,2** dengan predikat penilaian **baik**. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2020 berdasarkan pada 4 program, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100%	118,93%	118,93%
2	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%
3	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	50%	2,4%	4,8%
4	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100%
5	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,76	3,21	116%
6	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	25%	17,8%	71,2%

		Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%
		Persentase SKPD yang memanfaatkan aplikasi SPBE	25%	45%	180%
		Persentase SKPD yang memanfaatkan infrastruktur SPBE	25%	2,5%	10%
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	103%	103%
9	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan	Nilai SAKIP SKPD	79 nilai	72,58 nilai	Kategori BB
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	80%

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dari Anggaran Rp. 5.090.488.007 terealisasi sebesar Rp. 4.714.536.510,- (92,61%), dan fisik 97,87%. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD) tahun 2020 dari Anggaran Rp. 3.364.096.713,04 terealisasi sebesar Rp. 2.689.041.007,- (79,93%). Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp. 523.128.000,- terealisasi 606.694.000,- (115,97%).

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana komunikasi dan informasi guna menunjang pelaksanaan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pengembangan dan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	6
C. Isu Strategis	
C. Produk dan Layanan	16
D. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Visi RPJMD	19
B. Misi RPJMD	19
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
D. Indikator Kinerja Utama	22
E. Perjanjian Kinerja	23
F. Program dan Kegiatan	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	34
1. Sasaran RPJMD	34
2. Eselon II (Kepala Dinas)	35
3. Eselon III (Sekretaris)	
4. Eselon III (Kepala Bidang)	
5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)	
B. Akuntabilitas Keuangan	103
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020	103
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020	
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Strategi Peningkatan Kinerja	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya,**

**INovasi, TEtata, Religius, AKtual, SInergi)” melalui pelaksanaan program/kegiatan pada** Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan peran pers yang bebas, membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dan menciptakan keterbukaan informasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers yang kondusif bagi pengembangan peran serta masyarakat dalam era globalisasi informasi. Oleh karena itu secara konsisten, segenap komponen bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut perlu turut serta mendapatkan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian kebebasan di bidang informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut;
2. Terwujudnya inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
3. Terwujudnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut;
4. Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
5. Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
6. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut.

## **B. Struktur Organisasi Tugas dan fungsi**

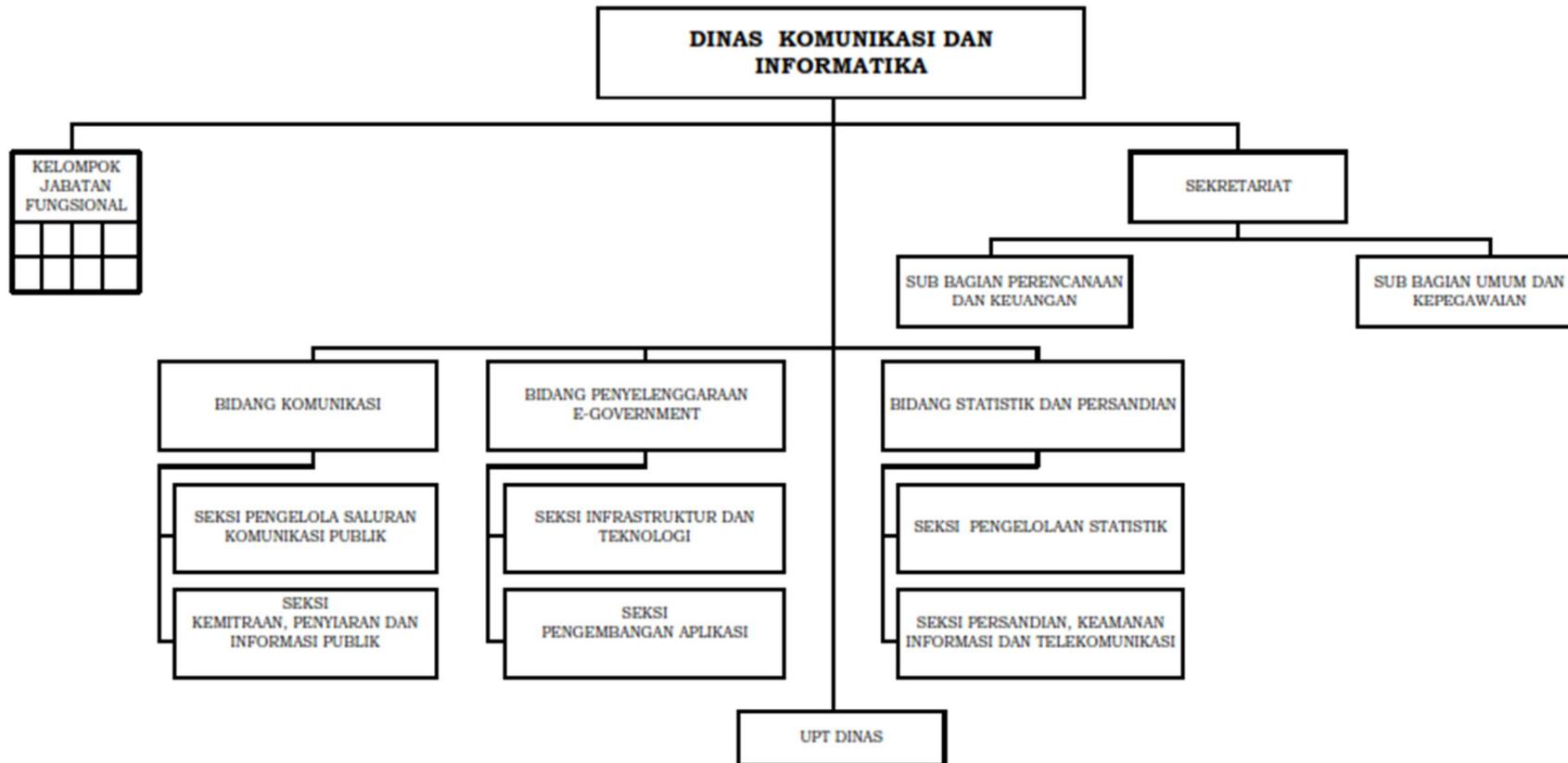
Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam urusan pemerintahan komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 77 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
  - 2) Seksi Kemitraan Penyiaran dan dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
  - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
  - 2) Seksi Persandian
- f. Unit Pelaksana Teknis

### **Kepala Dinas**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;

- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat membawahi dari:**

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bidang Komunikasi**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
  - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Bidang Komunikasi membawahi dari:**

- 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
- 2) Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik.

**Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan saluran komunikasi publik.

**Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kemitraan, penyiaran dan informasi publik.

## **Bidang Penyelenggaraan E-Government**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
  - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
  - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi dari:**

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.

## **Seksi Infrastruktur dan Teknologi**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait infrastruktur dan teknologi.

### **Seksi Pengembangan Aplikasi**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi.

### **Bidang Statistik dan Persandian**

(1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.

(2) Menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
- b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:**

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

### **Seksi Pengelolaan Statistik**

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

### **Seksi Persandian**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 17 orang tersebut, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 2 orang, Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 5 orang dan 2 staf sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi, staf pelaksana sebanyak 6 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			2			2
4	Kepala Seksi				5		5
5	Staf PNS					8	8
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebanyak 7 orang, diikuti golongan II sebanyak 6 orang, golongan IV sebanyak 4 orang serta ditambah tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 18 (delapan belas) orang. Selain pegawai berstatus PNS dan Pegawai PTT, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut juga dibantu oleh 10 (sepuluh) orang tenaga ahli..

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang		1	1					2
4	Kepala Seksi			6					6
5	Staf		1		3	3			7
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 3 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang 1 orang dan staf pelaksana 1 orang. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 3 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang

diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

### **C. Isu Strategis**

Isu-isu strategis terkait pengembangan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan permasalahan, sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM berlatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
3. Penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah.
4. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah.
5. Peningkatan penggunaan domain resmi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik

### **D. Produk dan Layanan**

Pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Penyiaran iklan layanan masyarakat
- b. Peliputan dan penyiaran
- c. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi)
- d. Pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi
- e. Pengendalian hak akses data

- f. Pemeliharaan dan akses data center
- g. Layanan lapor.go.id Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- h. Manajemen dan akses data jaringan (*network*)
- i. Pembuatan domain *website* resmi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Desa dan organisasi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- j. *Co-Location* / Penempatan server dan hosting aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- k. *Back-up* dan *restore database server* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- l. *Update website*
- m. Layanan data sektoral
- n. Tata kelola berita sandi

#### **E. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2020. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

##### 1. DAFTAR ISI

## 2. RINGKASAN EKSEKUTIF

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon II (Kepala Dinas)
  - 3. Eselon III (Sekretaris)
  - 4. Eselon III (Kepala Bidang)
  - 5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)
- B. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020
  - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
  - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- 4. Cascading/Pohon Kinerja
- 5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **Rencana Strategis (Renstra)**

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

#### **A. Visi RPJMD**

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI  
(BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

#### **B. Misi RPJMD**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;

2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1** : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
  - Tujuan** : 1. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut
  - Sasaran** : 1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut  
1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi  
1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)
  
2. **Misi 2** : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
  - Tujuan** : 2. Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut
  - Sasaran** : 2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi
  
3. **Misi 3** : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
  - Tujuan** : 3.1 Terwujudnya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)  
3.2 Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan SPBE  
3.3 Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan  
3.4 Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut
  - Sasaran** : 3.1.1 Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut  
3.2.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)  
: 3.3.1 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian  
: 3.3.2 Meningkatnya kualitas pelaporan dan

perencanaan  
: 3.4.1 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100 %
2	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %
3	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	50 %
4	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %
5	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,76
6	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	25 %
		Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %
		Persentase SKPD yang memanfaatkan aplikasi SPBE	25 %
		Persentase SKPD yang memanfaatkan infrastruktur SPBE	25 %

8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
9	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan	Nilai SAKIP SKPD	79 nilai
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80 %

Berikut diperlihatkan tabel tujuan, indikator, target, sasaran, indikator dan target 5 Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.2 Tujuan, indikator, target, sasaran, indikator, target 5 tahun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi publik	100%	1.1 Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100%	100%	100%	100%	100%
				1.2 Meningkatkan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %
		Persentase peningkatan SKPD terhadap keamanan informasi	100 %	1.3 Meningkatkan SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	2,4%	50%	20%	20%	7,6%
2.	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut	Persentase inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	2.1 Meningkatkan fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya pengembang	Persentase SKPD yang	2,8	3.1 Meningkatnya	Indeks SPBE (Sistem	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8

	an dan pengelolaan SPBE	memiliki fasilitas (sumber daya) penunjang SPBE		pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Pemerintahan Berbasis Elektronik)					
			100%	3.2 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%
				3.3 Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase kenaikan penggunaan domain tanahloutkab.go.id	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
4.	Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	100%	3.4 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				3.5 Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan	Nilai SAKIP SKPD	78 nilai	79 nilai	80 nilai	81 nilai	82 nilai
5.	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	Persentase data sektoral SKPD yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	3.6 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	80%	100%	100%

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran strategis adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE	1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Hasil Penilaian SPBE dari Menpan RB	Dinas Kominfo

	Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut			
--	---	--	--	--

## E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 yang telah disepakati baik oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

### Perjanjian/Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2020 (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.76

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

6. Program Pengelolaan Komunikasi Publik
7. Program Pengembangan Data/Informasi
8. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	1. Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan	2. Nilai SAKIP SKPD	79 nilai

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100%
2.	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%

1. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan  
E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	25 %
		Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %
		Persentase SKPD yang memanfaatkan aplikasi SPBE	25 %
		Persentase SKPD yang memanfaatkan infrastruktur SPBE	25 %
2.	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Statistik dan  
Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2020**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	50 %
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase statistik sektoral daerah	80 %

1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta aset daerah	Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	65 berkas

		Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal.	10 orang
		Jumlah laporan pengelolaan aset daerah.	2 laporan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
  - 2 Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
  - 3 Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 4 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
  - 5 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
  - 6 Peningkatan kemampuan teknis aparatur
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
  - 7 Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan serta pelaporan kinerja dinas	Jumlah dokumen perencanaan dinas	3 dokumen
		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dinas	4 dokumen
		Jumlah dokumen laporan keuangan dinas.	32 dokumen

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
  - 1 Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
  - 2 Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
  - 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan pengelolaan layanan komunikasi publik	Jumlah data layanan jaringan komunikasi publik	12 dokumen
		Jumlah konten lokal maupun nasional yang dibuat dan siap dipublikasikan	720 konten

- 1 Program Pengelolaan Komunikasi Publik 1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik	Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website ppid	100 data
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	3 KIM
		Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa daerah radio, media sosial dan website pemerintah daerah	720 informasi/berita

- 1 Program pengelolaan komunikasi publik 1 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Memfasilitasi dan memberikan layanan sarana dan prasarana infrastruktur	Jumlah sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1 unit

	penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan SPBE	10 SKPD
		Jumlah permohonan SKPD terkait fasilitasi layanan TIK yang terpenuhi	4 permohonan

- 1 Program Pengembangan 1 Kegiatan pembinaan dan Komunikasi, Informasi dan pengembangan jaringan komunikasi Media Massa dan informasi

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Memfasilitasi dan memberikan layanan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah permohonan penggunaan domain tanahloutkab.go.id	2 SKPD
		Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE	2 aplikasi
		Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan aplikasi daerah	40 SKPD

- 1 Program Pengembangan 1 Penyusunan aplikasi sistem informasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengisian indikator pada Aplikasi Satu Data Tanah Laut	Jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi
		Jumlah Buku Data Statistik Sektoral	1 buku

		Jumlah admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut	20 orang
--	--	---	----------

- 1 Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan profile daerah

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	Jumlah SKPD yang paham tentang penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi	40 SKPD
		Jumlah SKPD yang melaksanakan metode pengamanan data/informasi dengan menerapkan sertifikat elektronik	20 SKPD
		Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi	1 kali

- 1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi 1 Fasilitasi persandian dan pengamanan informasi

**F. Program dan Kegiatan**

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 792.641.867,-**
  - a) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi sebesar Rp. 249.300.480,-
  - b) Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran sebesar Rp. 127.665.900,-
  - c) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD sebesar Rp. 415.675.487,-
- 2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 466.754.468,-**
  - a) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sebesar Rp. 258.584.210,-
  - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebesar Rp. 88.820.258,-
  - c) Pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 50.350.000,-
  - d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sebesar Rp. 62.000.000,-
  - e) Peningkatan kemampuan teknis aparatur sebesar Rp. 7.000.000,-
- 3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan pelayanan SKPD sebesar Rp. 22.490.000,-**
  - a) Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan sebesar Rp. 22.490.000,-
- 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sebesar Rp. 3.147.889.600,-**
  - a) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sebesar Rp. 3.028.089.600,-
  - b) Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi sebesar Rp. 119.800.000,-
- 5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 6.804.000,-**

- a) Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD sebesar Rp. 2.129.400,-
  - b) Penyusunan laporan keuangan sebesar Rp. 4.174.600,-
  - c) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja sebesar Rp. 500.000,-
- 6. Program Pengelolaan Komunikasi Publik sebesar Rp. 619.475.472,-**
- a) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat sebesar Rp. 589.195.472,-
  - b) Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi sebesar Rp. 30.280.000,-
- 7. Program Pengembangan Data/Informasi sebesar Rp. 30.795.000,-**
- a) Penyusunan profile daerah sebesar Rp. 30.795.000,-
- 8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 3.637.600,-**
- a) Fasilitasi persandian dan pengamanan informasi sebesar Rp. 3.637.600,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target sasaran strategis RPJMD dan perjanjian kinerja tahun 2020. Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut diukur dengan membandingkan realisasi capaian kinerja terhadap target untuk setiap indikator sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana hasil proses penyetaraan cascading kinerja oleh Tim Sakip. Regulasi kinerja dilakukan pada setiap pimpinan, mulai dari Eselon II (Kepala), Eselon III (Sekertaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi).

Dalam penyusunan penilaian kinerja, perhitungannya persentase pencapaian secara umum, menggunakan rumus pembilang (target) dibagi dengan penyebut (realisasi) dikali 100%.

#### **1. Sasaran RPJMD**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2018-2023 telah menetapkan beberapa sasaran strategis. LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran 2020 adalah Laporan Kinerja Dinas yang merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan keadaan, Renstra dibuat untuk setiap sasaran dapat lebih dari satu indikator kinerja sasaran dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan indikator kinerja yang

akan dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 sesuai sasaran strategis yang akan diketahui keberadaannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengelompokan Capaian Kinerja

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
I	> 90 %	Sangat Memuaskan
II	81% - 90%	Memuaskan
III	71 % - 80 %	Sangat Baik
IV	61 % - 70 %	Baik
V	51 % - 60 %	Cukup
VI	< 50 %	Kurang

Berikut diperlihatkan tabel realisasi capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTAS E CAPAIAN TAHUN 2020	KET
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100 %	100 %	118,93 %	118,93 %	
2	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	100 %	27 %	27 %	100 %	
3	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	2,4 %	50 %	2,4 %	4,8 %	
4	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,76	2,76	3,21	116,3 %	Kategori Baik

6	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %	25 %	17,8 %	71,2 %	
		Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Persentase SKPD yang memanfaatkan aplikasi SPBE	-	25 %	45 %	180 %	
		Persentase SKPD yang memanfaatkan infrastruktur SPBE	-	25 %	2,5 %	10 %	
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	94 %	100 %	103 %	103 %	
9	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan	Nilai SAKIP SKPD	71,18 nilai	79 nilai	72,58 nilai	91,87 %	Kategori BB
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase statistik sektoral daerah	80 %	80 %	80 %	100 %	
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN</b>						<b>97,87 %</b>	<b>Kategori Sangat Memuaskan</b>

Hasil perhitungan persentase rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 adalah **97,87%** dengan kategori capaian **Sangat Memuaskan**. Meskipun demikian, ada beberapa hal terkait hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus secara konsisten.

## 2. Eselon II (Kepala Dinas)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut dengan indikator kinerja utama Indeks SPBE, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.76	3,21

- Uraian dan Analisa Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai target Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, maka dapat dibuat tabel 3.2 mengenai Capaian Indikator Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dan 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dan 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2019		2020		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE	2,0	2,76	2,76	3,21	Indeks

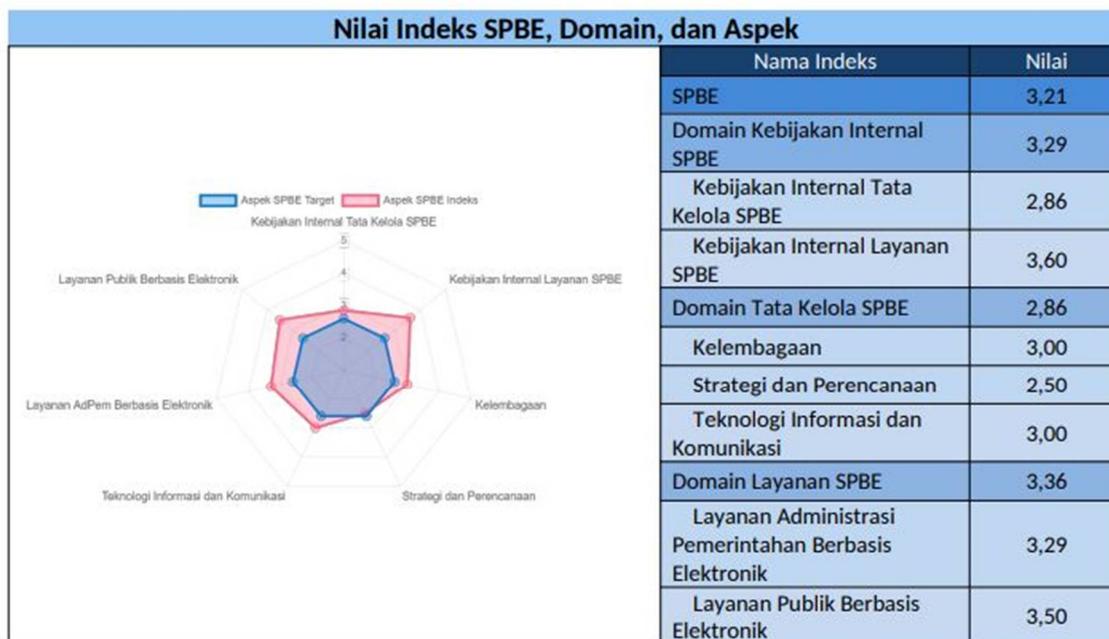
Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2020		
		2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,76	2,76	3,21	116,3 %

Gambar Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

<b>INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT</b>	<b>3,21</b> (Baik)
---	-----------------------



a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan e-Government, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut.

Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan

terpercaya. SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Penilaian SPBE tahun tahun 2020 dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dengan jumlah Tim:

1. Koordinator : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Anggota : - Universitas Indonesia (Jakarta)  
 - Universitas Gajah Mada (Yogyakarta)  
 - Universitas Gunadharma (Jakarta)  
 - Politeknik Elektronika (Surabaya)  
 - Universitas Telkom (Bandung)

Hasil evaluasi SPBE Tahun 2020 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 adalah sebesar 3,21 yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan (2,76), dengan realisasi mencapai 116,3%. Nilai indeks 3,21 masuk dalam predikat baik (2,6–3,5). Tabel berikut memperlihatkan kategori nilai SPBE.

Tabel 3.4 Kategori SPBE

NO	NILAI SPBE	PRIDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – <4,2	Sangat Baik
3	2,6 – <3,5	Baik
4	1,8 – <2,6	Cukup

Penilaian SPBE didasarkan atas domain dan aspek penilaian, yang dirincikan sebagai tabel berikut.

Tabel 3.5 Domain dan Aspek Penilaian

No	DOMAIN	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	Kebijakan SPBE	- Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
		- Kebijakan Layanan SPBE	10%
2	Tata Kelola SPBE	- Kelembagaan	8%
		- Strategi dan Perencanaan	8%
		- Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
3	Layanan SPBE	- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
		- Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Indeks SPBE tahun 2020 adalah 3,21 sedang 2019 adalah 2.76 dan pada awal penilaian 2018 adalah 1,42, artinya indeks SPBE mengalami peningkatan atau semakin baik per tahunnya. Peningkatan tersebut cukup signifikan, dan dapat diartikan juga bahwa terjadi peningkatan dalam hal tata kelola kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan administrasi pemerintahan dan publik berbasis elektronik. Untuk tahun 2021 pemenuhan indikator penilaian akan terus ditingkatkan guna peningkatan layanan berbasis elektronik yang lebih baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 128 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat bahwa indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten

Tanah Laut adalah 3,21 masih lebih tinggi dari 5 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yakni Kabupaten Tanah Bumbu 3,00; Kabupaten Banjar 2,68; Kota Banjarbaru 2,62; Kabupaten Tabalong 2,29; dan Kabupaten Tapin 2,16. Meskipun demikian, seluruh pimpinan dan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diinstruksikan agar meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dengan Nilai 3,21 bila dibandingkan tahun 2019 (2,76) meningkat 0,45. Peningkatan ini didapat dari hasil kerja sama dan koordinasi seluruh unit-unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Berbagai upaya yang dilakukan dengan membentuk Tim Evaluasi Internal Penilaian Mandiri SPBE di Kabupaten Tanah Laut, menyusun aktualisasi pelaksanaan SPBE, menentukan target indikator untuk dipenuhi, menyusun rencana aksi dan tindak lanjut sosialisasi, melakukan kegiatan teknis penunjang SPBE seperti integrasi berbagai aplikasi, penyediaan/fasilitas sarana/prasarana komunikasi dan informasi, peningkatan layanan publik, peningkatan SDM aparatur, dan lain-lain.

Hal yang paling penting tercapainya target dan peningkatan SPBE adalah komitmen pimpinan (Bupati) yang sangat tinggi, sehingga memacu SKPD lain untuk lebih serius dan aktif mengimplementasikan SPBE. Akhirnya koordinasi dan kerja sama dapat terjalin dengan baik antar SKPD.

Selanjutnya untuk dapat lebih meningkatkan SPBE di tahun mendatang, beberapa hal rekomendasi di bawah ini agar dapat dilakukan, yaitu: perlunya peningkatan aplikasi-aplikasi Layanan Publik menuju Integrasi Layanan antar OPD dan

dengan privinsi dan pusat, perlunya pengembangan pusat data dan peletakan server semua OPD di pusat data dan SOP pemanfaatan pusat data oleh semua OPD, perlunya pembuatan dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang lengkap dan mencakup semua OPD.

### 3. Eselon III (Sekretaris)

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Sekretaris tahun 2020.

Tabel 3.21 Hasil capaian realisasi sasaran 3.3 dan 3.4

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	3.3 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	103%	103%	100%
2	3.4 Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan	Nilai SAKIP SKPD	79 nilai	72,58 nilai	91,87%	82 nilai
Rata-Rata Capaian					97,44 %	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2020		
		2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	103%	103%
2.	Nilai SAKIP SKPD	71,18 nilai	79 nilai	72,58 nilai	91,87%
Rata-rata Capaian					97,44%

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 97,44%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 103 % dan target 100 % tahun 2020 sehingga persentase capaiannya 103%. Untuk indikator nilai SAKIP SKPD hanya tercapai nilai sakip 72,58 dari target tahun 2020 nilai 79, yang disebabkan masih banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga persentase capaian nilai SAKIP SKPD adalah 91,87 %.

b) *Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2020 dengan tahun 2019 yang terdiri dari indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 103% pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2019 realisasinya 100%. Indikator persentase indikator nilai SAKIP SKPD juga telah terealisasi dengan nilai 72,58 dengan target nilai 79 sehingga persentase tercapaian pada 91,87%.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu**

Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 telah mencapai 103% dari target yang ada yaitu sebanyak 67 berkas yang terdiri atas 11 berkas urusan umum dan 56 berkas urusan kepegawaian. Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan

kepegawaian. Strategi kedepannya ialah perlunya penambahan tenaga personil kepegawaian untuk membantu urusan kepegawaian dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

- **Nilai SAKIP SKPD**

Nilai SAKIP SKPD di tahun 2020 hasil dari evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh nilai 72,58 (kategori BB) dari target yang ada (79) dengan persentase capaian 91,87%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Dari hasil evaluasi direkomendasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja

Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen perjanjian kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

b. Pelaporan Kinerja

Informasi dan data kinerja yang andal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja.

c. Evaluasi Internal

Perlu dilaksanakannya evaluasi terhadap program yang dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

d. Pencapaian Kinerja

- Informasi yang disajikan agar digunakan dalam pelaksanaan untuk perbaikan perencanaan;
- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja.

d) *Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Pengelolaan administrasi umum.
2. Pengelolaan data kepegawaian.
3. Pengelolaan data aset dan BMD pada dinas.
4. Pelayanan persuratan dinas.
5. Pengelolaan administrasi keuangan.
6. Pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Pelayanan administrasi perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 749.743.264,- dari pagu program Rp 792.641.867,- dengan persentase capaian 94,59 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 42.898.603,-. Pada program pemenuhan, peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia dengan realisasi anggaran sebesar Rp 399.599.115,- dari pagu program Rp 456.754.458,- dengan persentase capaian 85,61 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 67.155.353,-. Pada program penyebaran informasi pembangunan dan pelayanan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- dari pagu program Rp 22.490.000,- dengan persentase capaian 0 %, pada program ini memang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang terus meningkat di Kabupaten Tanah Laut. Pada program perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.559.900,- dari pagu program Rp 6.804.000,- dengan persentase capaian 81,72 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.320.000,-.

*f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian program pada Sekretariat didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian.
- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sekretariat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di sekretariat yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran program untuk sekretariat Dinas Kominfo sebagian besar ditargetkan pada awal triwulan I dan II karena merupakan program penunjang urusan administrasi perkantoran, pemenuhan fasilitas perkantoran, pemeliharaan serta penyusunan laporan kinerja dan keuangan dinas.
- Rencana aksi kinerja untuk sekretariat Dinas Kominfo juga sebagian besar ditargetkan di awal triwulan I dan II menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran program.

*h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Sekretariat, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Sekretariat Dinas Kominfo
- Belum optimalnya monitoring program kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan kinerja.

- Kurangnya data dukung administratif atau dokumentasi program kegiatan yang dilaksanakan sehingga mempersulit dalam penyusunan laporan akhir.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil dalam menunjang pelaksanaan di Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan atau diklat terkait.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala per triwulan
- Melakukan pengumpulan data dukung secara intensif sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan akhir.

#### 4. Eselon III (Kepala Bidang)

##### 4.1 Kepala Bidang Komunikasi

Tabel 3.8 Hasil capaian realisasi sasaran 1.1 dan 1.2

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100%	118,93%	118,93%	
2	1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%	

	Teknologi Informasi					
Rata-Rata Capaian					109,47%	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2020		
		2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase informasi yang disebarakan	100%	100%	118,93%	118,93%
2.	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%	100
Rata-rata Capaian					109,47%

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja bidang pengelolaan komunikasi adalah 109,47% dari 2 indikator kinerja, indikator persentase informasi yang disebarakan telah tercapai 118,93% dari target 100% tahun 2020, dan indikator lainnya juga telah tercapai 27% dari target tahun 2020 (27%).

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2020 dengan tahun 2019 yang terdiri dari indikator persentase informasi yang telah disebarakan telah tercapai 118,93 % melebihi target 100 % pada tahun 2020 sedang pada tahun 2019 sebelumnya juga telah tercapai 100%. Sedangkan pada indikator Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi juga telah terealisasi 27% dengan target 27% sehingga tercapai 100%.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Persentase Informasi yang Disebarkan**

Persentase informasi yang disebarakan oleh Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 dicapai angka 118,93 % dari target capaian 100%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah informasi yang disebarakan sebanyak 1.784 data/informasi dibagi data informasi yang harus disebarakan sebanyak 1500 data/informasi target dalam setahun pelaksanaan kegiatan. Capaian 1.784 data/informasi tersebut terdiri atas Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website Tanah Laut sebanyak 1093 informasi dan Jumlah data/informasi publik melalui website PPID Kabupaten Tanah Laut sebanyak 691 informasi. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran informasi tersebut selain melalui website Tanah Laut dan PPID Tanah Laut juga disebarakan melalui media lainnya seperti Radio Tuntung Pandang FM, media cetak dan media sosial serta melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dalam pengelolaan informasi, yang semuanya telah dilaksanakan pada tahun berkenaan, namun dalam hal penyebaran informasi tersebut harus dilakukan melalui proses analisa dan identifikasi serta klasifikasi atas data/informasi yang akan disebarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terlebih dahulu, dengan tujuan menjaga kebenaran dan akurasi data/informasi tersebut. Seluruh pencapaian atas target indikator ini dapat tercapai atas hasil kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung terlaksananya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.

*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Forum konsultasi publik melalui siaran radio pada program dialog interaktif dalam program Tanah Laut Menyapa, Pojok UMKM, Halo Dokter, Halo Polisi dengan menghadirkan narasumber dari SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat.
3. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui pelatihan pembuatan media publikasi berupa blogspot, dan pelatihan tata cara penulisan berita dan pengambilan foto untuk konten publikasi.
4. Penyebarluasan informasi melalui media sosial fanpage Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, portal website Tanah Laut di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut [www.tanahlautkab.go.id](http://www.tanahlautkab.go.id).
5. Pro-Aktif dalam penyebarluaskan informasi valid dan cegah isu *hoax* virus corona melalui media pemerintah daerah.
6. Penyebaran informasi terkait sosialisasi protokol kesehatan dan sanksi pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut.
7. Membentuk Tim Pencanaan dan Pembinaan Desa Informatik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Guna Mendukung Program Desa Dibina Kota Ditata.
8. Peningkatan fasilitas ruangan Radio beserta peralatan penunjangnya.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Komunikasi telah terlaksana secara keseluruhan pada satu buah program, yaitu program pengelolaan komunikasi publik dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 578.287.986,- dari pagu program Rp 619.475.472,- dengan persentase capaian 93,35 %, terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 41.187.486,-.

*f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian program pada Bidang Komunikasi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah dikelola cukup baik oleh sebagian besar perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Menghadirkan narasumber dari SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat untuk mengisi program forum konsultasi publik melalui siaran radio.
- Peningkatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui pelatihan-pelatihan.
- Peningkatan SDM pada bidang komunikasi dalam pengelolaan informasi melalui media sosial dan media online lainnya.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di bidang Komunikasi yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Bidang Komunikasi dengan program pengelolaan komunikasi dan informasi publik disusun dengan target penggunaan anggaran pada triwulan I 20%, Triwulan II 20%, triwulan III 30% dan triwulan IV 30%.

- Rencana aksi kinerja pada Bidang Komunikasi dengan target kinerja persentase informasi yang disebarakan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran yakni triwulan I 20%, Triwulan II 20%, triwulan III 30% dan triwulan IV 30%

*h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Komunikasi, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Bidang Komunikasi
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis pengelolaan informasi publik.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan informasi publik

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis jurnalis dan tenaga teknologi informatika pada bidang komunikasi.
- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan atau diklat terkait pengelolaan informasi publik.

#### 4.2 Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Tabel 3.13 Hasil capaian realisasi sasaran 3.1 dan 2.1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	3.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	25 %	17,8%	71,2%	100%
		Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%	100%
		Persentase SKPD yang memanfaatkan	25%	45%	180%	100%

		aplikasi SPBE				
		Persentase SKPD yang memanfaatkan infrastruktur SPBE	25%	2,5%	10%	100%
2.	2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					92,24%	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2020		
		2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	25%	25%	17,8%	71,2%
2.	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase SKPD yang memanfaatkan aplikasi SPBE	N/A	25%	45%	180%
4.	Persentase SKPD yang memanfaatkan infrastruktur SPBE	N/A	25%	2,5%	10%
5.	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					92,24%

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja bidang penyelenggaraan e-government telah terealisasi 92,24%. Pada indikator kinerja persentase SKPD yang menerapkan SPBE telah tercapai 17,8% dari target tahun 2020 (25%) sehingga persentase capaiannya 71,2%. Untuk indikator persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id dengan target 100% telah tercapai 100%,

untuk indikator persentase SKPD yang memanfaatkan aplikasi SPBE dengan telah tercapai 180% melebihi yang target yang ada, untuk indikator persentase SKPD yang memanfaatkan infrastruktur SPBE hanya tercapai 2,5% dari target tahun 2020 (25%) sehingga persentase capaiannya hanya 10%. Pada indikator kinerja Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% dengan target 100%.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2020 dengan 2019 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang menerapkan SPBE telah tercapai 17,8% pada tahun 2019 sedangkan capaian pada tahun 2019 tercapai 25%. Sedangkan pada indikator Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id juga telah terealisasi 100% dengan target 100% sehingga tercapai 100% seperti halnya pada tahun 2019. Pada tahun 2020 ada penambahan dua indikator yakni persentase SKPD yang memanfaatkan aplikasi SPBE dan persentase SKPD yang memanfaatkan infrastruktur SPBE dengan capaian masing-masing 180% dan 10%.

Pada indikator kinerja Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% dengan target 100% pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2019 juga telah tercapai 100%.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase SKPD yang menerapkan SPBE**

Persentase SKPD yang menerapkan SPBE yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 telah tercapai 17,8 % dari target 25% dengan persentase capaian 71,2% dibandingkan tahun 2019

telah tercapai mencapai 100% dari target yang ada. Data tersebut diperoleh dari penghitungan jumlah SKPD (SKPD, Kecamatan, Kelurahan) yang menerapkan e-government dibagi jumlah SKPD yang ada (berjumlah 45). Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan delapan SKPD dalam penerapan SPBE dalam pelayanannya yaitu BKPSDM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Kurau, Badan Perencanaan dan Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Penerapan SPBE baru mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal. Pada tahun 2019 mulai meningkat 4 SKPD proses pencapaian tersebut didukung dengan baik oleh Kepala Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut, sehingga SKPD dapat meningkatkan pemahaman tentang perlunya Penerapan SPBE. Keberhasilan capaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dari seluruh instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah guna menghadapi era digital yang terus berkembang. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah kurangnya infrastruktur TIK dan belum terintegrasinya jaringan antar SKPD sehingga pencapaian belum maksimal. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPBE tersebut dalam bentuk konsultasi/koordinasi dan juga pemberian rekomendasi pembuatan jaringan dan

perangkat yang diperlukan oleh SKPD dalam penerapan SPBE. Untuk kedepannya perlu diadakan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang SPBE tersebut serta melakukan koordinasi secara langsung terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi dalam indikator SPBE.

- **Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi**

Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 telah mencapai 100% dari target yang ada. Persentase capaian dihitung dari jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dibagi jumlah permohonan SKPD dikali 100%. Ada empat buah SKPD yang memohon fasilitasi dan dari semua permohonan tersebut telah diproses sesuai permohonan yaitu dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu dan UPT Rumah Sakit KH. Mansyur (Permohonan Pembuatan Website dan Permohonan Layanan Cloud dan Pembangunan Website); Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (permohonan Layanan Subdomain Sosialita Kabupaten Tanah Laut dan Permohonan Fasilitasi Pembuatan Aplikasi Bagian Hukum); Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut (permohonan Layanan Cloud dan Pembangunan Website). Proses fasilitasi dilakukan melalui surat permohonan dari SKPD yang bersangkutan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian didisposisi oleh Kepala Dinas kepada Bidang Penyelenggaraan E-Government untuk diproses dan ditindaklanjuti. Strategi kedepannya ialah perlunya menyediakan layanan terpadu satu pintu pada setiap surat permohonan yang masuk kepada

Dinas melalui online dan menyiapkan penjadwalan petugas informasi guna pelayanan e-government yang lebih baik.

*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Penyediaan layanan internet dan layanan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
2. Penyediaan layanan internet gratis di fasilitas umum di wilayah Pelaihari
3. Pengelolaan aplikasi e-lapor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4. Penyediaan layanan-layanan terkait teknologi dan informasi bagi seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya pengembangan aplikasi, jaringan, integrasi data, layanan *hosting*, *colocation server* dan digitalisasi.
5. Peningkatan peralatan penunjang kerja bagi aparatur guna pengoptimalan kinerja.
6. Kerjasama Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government.
7. Penyediaan fasilitas video conference bagi SKPD di Lingkup Kabupaten Tanah Laut.
8. Pembangunan jaringan fiber optik dan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pembuatan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
10. Peningkatan SDM aparatur dengan mengadakan diklat intern urusan teknologi informasi.
11. Pembangunan Ruang Network Operation Center (NOC) beserta fasilitas penunjangnya.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyelenggaraan E-Government hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik

pada program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.948.483.645,- dari pagu program Rp 3.147.889.600,- dengan persentase capaian 93,67 %. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 199.405.955,-.

*f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian program pada Bidang Komunikasi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pelaksanaan pemenuhan indikator penunjang penilaian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang telah dikelola dengan cukup baik oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government.
- Dukungan langsung dari Kepala Daerah dan Sekretaris daerah melalui Kepala Dinas dalam memberikan arahan dan masukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan e-government di Kabupaten Tanah Laut.
- Peningkatan SDM pada bidang Penyelenggaraan E-Government dalam pengelolaan sistem jaringan dan aplikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Adanya Kerjasama yang baik dari Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada bidang Penyelenggaraan E-Government pada program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebagian besar disusun pada Triwulan II 10%, triwulan III 10% dan triwulan IV 5%.
- Rencana aksi kinerja pada bidang Penyelenggaraan E-Government pada program pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa dengan target kinerja Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan II 10%, triwulan III 10% dan triwulan IV 5% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

#### *h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Komunikasi, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Bidang penyelenggaraan E-Government.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta aplikasi pada Network Operation Center (NOC).
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta aplikasi.
- Telah tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan teknologi dan informasi.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Teknologi Informatika pada bidang penyelenggaraan E-Government.
- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan atau diklat terkait pengelolaan Teknologi Informasi.
- Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang SPBE dan koordinasi secara langsung terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi dalam indikator SPBE.
- Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan Gedung Network Operation Center (NOC).

### 4.3 Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Tabel 3.17 Hasil capaian realisasi sasaran 1.3 dan 3.5

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	50%	2,4%	4,8%	100%
2	5.3 Meningkatnya kualitas data sektoral daerah	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					52,4%	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2020		
		2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	2,4%	50%	2,4%	4,8%
2.	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	80%	100%
Rata-rata Capaian					52,4%

#### a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja bidang Statistik dan Persandian telah terealisasi 52,4%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik hanya tercapai 2,4 % dengan target 50% tahun 2020 sehingga persentase capaiannya hanya 4,8%. Untuk 1 indikator lainnya telah tercapai 80% dari

target tahun 2020 (80%), sehingga persentase capaiannya 100%.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2020 dengan tahun 2019 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik hanya tercapai 2,4% pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2019 kegiatan ini hanya tercapai 2,4%. Baru di tahun 2020 diperoleh hasil realisasi 2,4% dengan target 50%. Sedangkan pada indikator Persentase statistik sektoral telah terealisasi 80% dengan target 80% sehingga tercapai 100%.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik**

Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 hanya mencapai 2,4% dari target yang 50%. Hal ini disebabkan pemanfaatan persandian baru dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal sedang pada tahun 2020 terkait tanda tangan elektronik masih dalam tahapan pengusulan ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Namun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut akan terus mengupayakan tanda tangan elektronik ini agar adapat diterapkan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan dukungan dari Kepala Daerah serta kerja sama yang solid antar SKPD agar dapat tercapai dengan baik guna

menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi persandian/keamanan informasi diterapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen/informasi/data elektronik. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah transformasi persandian yang semula hanya mengurus keamanan informasi rahasia (santel) menjadi kegiatan keamanan informasi secara keseluruhan belum tersosialisasikan dengan baik. Pengamanan informasi harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat, sehingga sumber daya yang ada dapat menyesuaikan dengan isu-isu teknologi terkini. Strategi kedepan ialah perlunya penambahan personil bidang keamanan informasi dan keamanan siber, maupun adanya pelatihan/bimbingan teknis/koordinasi/ tentang keamanan informasi dengan instansi-instansi terkait.

- **Persentase statistik sektoral daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian dalam pencapaian Persentase statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 telah mencapai 80% dari target yang ada dengan persentase capaian 100%. Semua SKPD telah melakukan input indikator data pada aplikasi Satu Data Tanah Laut sehingga target telah tercapai 80 %. Aplikasi Satu Data perlu dikembangkan/update sistem untuk dapat lebih banyak melakukan input data terhadap indikator-indikator yang harus terisi datanya. Kendala dalam pelaksanaannya ialah setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data. Langkah kedepan perlu pengembangan aplikasi satu data TanahLaut untuk menunjang kegiatan penyusunan profil daerah yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala.

*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Focus Group Discussion (FGD) dalam pengelolaan data statistik.
2. Sosialisasi Satu Data Tanah Laut ke SKPD di Lingkup Pemkab Tanah Laut.
3. Pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data.
4. Pengembangan dan update aplikasi Satu Data Tanah Laut.
5. Koordinasi terkait program kegiatan bidang statistik dan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pencetakan Buku Ikhtisar Statistik Sektor Kabupaten Tanah Laut.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Statistik dan Persandian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program pengembangan data/informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.475.000,- dari pagu program Rp 30.795.000,- dengan persentase capaian 95,71 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.320.000,- sedangkan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.387.600,- dari pagu program Rp 3.637.600,- dengan persentase capaian 93,13 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 250.000,-.

*f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian program pada Bidang Statistik dan Persandian didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Tahap awal pengusulan pemanfaatan persandian dengan menggunakan tanda tangan elektronik ke Balai Sertifikasi

Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada bidang Statistik dan Persandian pada program pengembangan data dan informasi disusun pada Triwulan I 10%, triwulan II 70% dan triwulan IV 20%; program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi disusun pada Triwulan I 100%.
- Rencana aksi kinerja pada bidang Statistik dan Persandian pada program pengembangan data dan informasi dengan target kinerja Persentase Statistik sektoral daerah sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 10%, triwulan II 70% dan triwulan IV 20% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sedangkan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target kinerja Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 50% sesuai dengan ketersediaan anggaran.

*h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Komunikasi, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Bidang Statistik dan Persandian khususnya untuk jabatan fungsional Sandiman maupun operator Sandi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis persandian dan keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

- Belum tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Persandian dan keamanan informasi pada bidang Statistik dan Persandian.
- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait Persandian dan Keamanan Informasi.
- Melakukan sosialisasi tentang Persandian dan pentingnya keamanan informasi.
- Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Peningkatan SDM admin setiap SKPD dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
- Pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala oleh produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## 5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)

### 5.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSentase CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta aset daerah	Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	65 berkas	67 berkas	103 %	65 berkas

	Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	2 orang	20%	10 orang
	Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan
Rata-Rata Capaian				74,33 %	

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kasubbag 2020 sebesar 74,33%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 3 indikator. Pada indikator jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas tercapai 67 berkas yang terdiri atas 11 berkas urusan umum dan 56 berkas urusan kepegawaian. Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 10 orang dengan hasil hanya tercapai 2 orang saja yang dapat melaksanakan diklat karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Indikator jumlah laporan pengelolaan aset daerah dengan target 2 laporan yaitu laporan pengelolaan belanja modal dan laporan pengelolaan barang habis pakai telah tercapai 100%.

b) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi**

Indikator jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas realisasinya yaitu 67 berkas yang diperoleh dari urusan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan ASN yang

dilayani secara tertib dengan target 100%, nilai realisasinya yaitu 103%.

- **Jumlah Jumlah Kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal**

Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 10 orang realisasinya yaitu 2 orang dengan persentase 10%. Kurangnya minat ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mengajukan diklat dan bimtek pada tahun 2020 sehingga hasil yang dicapai hanya 2 orang karena adanya pandemi Covid-19, namun ada solusi bagi beberapa ASN yang tetap ingin mengikuti Diklat yaitu diklat secara virtual atau online.

- **Jumlah laporan pengelolaan aset daerah**

Terealisasi sebanyak 2 laporan dengan target 2 laporan, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Laporan pengelolaan belanja modal dinas dan laporan pengelolaan barang habis pakai yang dibuat per triwulan untuk direkap selama satu tahun. Keberhasilan ini dicapai dengan pelaksanaan pengelolaan aset-aset daerah dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan rencana anggaran kas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

c) *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum bagi Dinas.
2. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian.

3. Melaksanakan pengelolaan data aset dan BMD pada dinas.
4. Melaksanakan pelayanan persuratan dinas.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Umum dan Kepegawaian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik sebagai berikut:

1. Kegiatan penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 248.135.881,- dari pagu kegiatan Rp 249.300.480,- dengan persentase capaian 99,53 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.164.599,-.
2. Kegiatan penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 107.289.236,- dari pagu kegiatan Rp 127.665.900,- dengan persentase capaian 84,04 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 20.376.664,-.
3. Kegiatan penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 394.318.147,- dari pagu kegiatan Rp 415.675.487,- dengan persentase capaian 94,86 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 21.357.340,-.
4. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 241.603.840,- dari pagu kegiatan Rp 258.584.210,- dengan persentase capaian 93,43 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 16.980.370,-.

5. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 39.721.275,- dari pagu kegiatan Rp 88.820.258,- dengan persentase capaian 44,72 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 49.098.983,-.
6. Kegiatan pembangunan gedung kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.689.000,- dari pagu kegiatan Rp 50.350.000,- dengan persentase capaian 98,69 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 661.000,-.
7. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 61.585.000,- dari pagu kegiatan Rp 62.000.000,- dengan persentase capaian 99,33 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 415.000,-.
8. Kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.000.000,- dari pagu kegiatan Rp 7.000.000,- dengan persentase capaian 100 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 0,-.
9. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- dari pagu kegiatan Rp 22.490.000,- dengan persentase capaian 0 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 22.490.000,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kesadaran dan kedisiplinan para ASN dan Pegawai Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melengkapi dokumen administrasi umum dan kepegawaian.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagian besar dianggarkan pada Triwulan I 50% dan triwulan II 50%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada kegiatan untuk operasional rutin kantor sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 50% dan triwulan II 50% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diantaranya:

- Kurangnya personil untuk mengelola data administrasi umum dan kepegawian
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada di sekretariat.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil baik PNS maupun tenaga kontrak.
- Pemanfaatan sistem informasi persuratan untuk memudahkan penataan surat-menyurat.
- Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum guna peningkatan kinerja dinas.

## 5.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSentase CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan serta pelaporan kinerja dinas	Jumlah dokumen perencanaan dinas	3 dokumen	3 dokumen	100 %	15 dokumen
		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dinas	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen
		Jumlah dokumen laporan keuangan dinas	32 dokumen	32 dokumen	100 %	128 dokumen
Rata-Rata Capaian					100 %	

### a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 3 indikator. Pada indikator jumlah dokumen perencanaan dinas dengan target 3 dokumen tercapai 3 dokumen yang terdiri atas dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT), dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dasar pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Indikator jumlah dokumen pelaporan kinerja dinas dengan target 4 dokumen dengan hasil tercapai 4 dokumen. Indikator jumlah dokumen laporan keuangan dinas dengan target 32 dokumen laporan yaitu dokumen laporan keuangan sebanyak 32 dokumen sehingga tercapai 100%.

*b) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**i. Jumlah dokumen perencanaan dinas**

Terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan target 3 dokumen, yang berarti telah terealisasi 100%. Dokumen tersebut yaitu dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2020 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dasar pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Tersedianya dokumen perencanaan dinas sebagai bagian administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan.

**ii. Jumlah dokumen pelaporan kinerja dinas**

Terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan target 4 dokumen, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen pelaporan kinerja baik fisik maupun keuangan dinas adalah dokumen yang dibuat setiap triwulan I, II, III, dan IV yang berisi perekapan hasil capaian kinerja SKPD pada tahun berkenaan.

**iii. Jumlah dokumen laporan keuangan**

Terealisasi sebanyak 32 dokumen dengan target 32 dokumen yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen laporan keuangan tersebut terdiri atas 24 laporan bulanan bendahara penerimaan dan pengeluaran, 8 laporan triwulan bendahara penerimaan dan pengeluaran. Dokumen laporan keuangan merupakan dokumen wajib SKPD yang harus dibuat dan dilaporkan setiap bulannya terkait pengeluaran dan penerimaan keuangan dinas.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD.
2. Melaksanakan pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

d) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik dengan anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.680.900,- dari pagu kegiatan Rp 2.129.400,- dengan persentase capaian 78,94 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 448.500,-.
2. Kegiatan penyusunan laporan keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.379.000,- dari pagu kegiatan Rp 4.174.600,- dengan persentase capaian 80,94 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 795.600,-.
3. Kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp 500.000,- dari pagu kegiatan Rp 500.000,- dengan persentase capaian 100 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 0,-

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Perencanaan dan Keuangan didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Pengelolaan administrasi perencanaan yang dilakukan cukup baik oleh para PNS dan tenaga kontrak pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Terpenuhinya personil pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD yang cukup mumpuni di bidangnya.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada dianggarkan pada Kegiatan penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD Triwulan I 75% dan triwulan IV 25%. Kegiatan penyusunan laporan Kegiatan pengendalian pada Triwulan I 80% dan triwulan IV 20%. Dan Kegiatan evaluasi dan pelaporan kinerja pada Triwulan II 20% dan Triwulan III 40% dan Triwulan IV 40%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kegiatan penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD, Kegiatan penyusunan laporan Kegiatan pengendalian dan Kegiatan evaluasi dan pelaporan kinerja sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 70% dan Triwulan II 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan keuangan, diantaranya:

- Terlalu banyaknya tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan keuangan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keterlambatan atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan.

## 5.2 Kepala Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik tahun 2020.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik	Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website ppid	300 data	318 data	106 %	90 data
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbantu dan memanfaatkan teknologi informasi	3 KIM	3 KIM	100 %	15 KIM
		Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa daerah	720 informasi/berita	1093 informasi/berita	152 %	1200 informasi/berita
Rata-Rata Capaian					119 %	

### a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik dalam Kegiatan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik terealisasi 119%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Kinerja Utama kegiatan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan Informasi Publik telah

terlaksana dengan hasil yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2019 (111%) dan tahun 2020 (119%), hal ini menunjukkan hasil keluaran yang dicapai telah melampaui target dengan peningkatan pada angka 8 %.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website ppid**

Terealisasi sebanyak 318 data informasi dengan target 300 data informasi, yang berarti terealisasi 106%. Data yang disampaikan melalui website PPID (<http://ppid.tanahlautkab.go.id/>) dimana data tersebut langsung bersumber dari masing-masing PPID-Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Namun dalam pengelolaannya juga terdapat kendala yakni belum semua SKPD memahami akan pentingnya melakukan update data/informasi pada website PPID ini dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik. Untuk kedepannya akan diambil langkah monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepala Daerah.



Gambar tampilan awal website PPID Kabupaten Tanah Laut

Adapun 318 rekap data tersebut pada tabel berikut:

No.	Judul	Jenis	Kategori	Penerbit
1	Laporan Realisasi Anggaran Sampai Desember 2019 DPUPRP	Laporan Keuangan	Berkala	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tanggal : 25 Desember 2020
2	LKPJ_LPPD DPUPRP	Laporan Keuangan	Berkala	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tanggal : 25 Desember 2020
3	EVALUASI PROGRAM KECAMATAN BAJUIN	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal : 15 Desember 2020
4	DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN KURAU	SOTK Badan Publik	Berkala	KEC. KURAU : 03 Desember 2020
5	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2020	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. KURAU : 03 Desember 2020
6	LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN 2020	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. KURAU : 03 Desember 2020
7	REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. KURAU : 03 Desember 2020

8	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2020	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. KURAU : 03 Desember 2020
9	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2020	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. KURAU : 03 Desember 2020
10	LAKIP DPUPRP TA. 2019	LAKIP	Berkala	DPUPRP : 26 November 2020
11	Program dan Kegiatan DPUPRP Tahun 2019	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DPUPRP : 26 November 2020
12	Lakip	Lakip	Berkala	SETDPRD : 19 November 2020
13	Ringkasan DPA	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	SETDPRD : 19 November 2020
14	Daftar Pegawai	Profil Badan Publik	Berkala	SETDPRD : 17 November 2020
15	Ringkasan DPA	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DP2KBP3A : 17 November 2020
16	RUP	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 17 November 2020
17	SOTK	Profil Badan Publik	Berkala	SETDPRD : 17 November 2020
18	Daftar Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	INSPEKTORAT : 11 November 2020
19	Daftar Pejabat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	INSPEKTORAT : 11 November 2020
20	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2019 dan 2020 (s.d Oktober)	Laporan Realisasi Anggaran	Berkala	INSPEKTORAT : 11 November 2020
21	PROSUDER KERJA PELAYANAN DISKOPDAG	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	DISKOPDAG : 11 November 2020
22	Rencana Umum Pengadaan pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut TA. 2020	Pengaduan dan Pelanggaran	Berkala	INSPEKTORAT : 11 November 2020
23	RUP Diskopdag	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DISKOPDAG : 11 November 2020
24	SOTK Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	INSPEKTORAT : 11 November 2020
25	Daftar Nama Pejabat Kec. Bajuin	Daftar Pejabat di Badan Publik	Berkala	KEC.BAJUIN : 10 November 2020

26	DAFTAR PEGAWAI	Daftar Pegawai di Badan Publik	Berkala	DPMD : 10 November 2020
27	DAFTAR PEGAWAI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT	Daftar Pegawai di Badan Publik	Berkala	DISTANHORBUN : 10 November 2020
28	Daftar Pegawai Kecamatan Bajuin	Daftar Pegawai di Badan Publik	Berkala	KEC.BAJUIN : 10 November 2020
29	DAFTAR PEJABAT	Daftar Pejabat di Badan Publik	Berkala	DPMD : 10 November 2020
30	Daftar Pejabat DPM-PTSP 2020	Daftar Pejabat di Badan Publik	Berkala	DPMPTSP : 10 November 2020
31	HASIL PENELITIAN DPM-PTSP	Hasil Penelitian	Berkala	DPMPTSP : 10 November 2020
32	KEBIJAKAN DPM-PTSP	Kebijakan berikut dokumen pendukungnya	Setiap Saat	DPMPTSP : 10 November 2020
33	LAKIP	LAKIP	Berkala	DPMD : 10 November 2020
34	LAKIP 2019 DPM-PTSP	LAKIP	Berkala	DPMPTSP : 10 November 2020
35	LAPORAN REAL ANGGARAN	Laporan Keuangan	Berkala	DPMD : 10 November 2020
36	LKPD 2019 DPM-PTSP	Laporan Keuangan	Berkala	DPMPTSP : 10 November 2020
37	LKPD DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT	Laporan Keuangan	Berkala	DISTANHORBUN : 10 November 2020
38	LKPJ	Laporan Keuangan	Berkala	DPMD : 10 November 2020
39	LPPD	Laporan Keuangan	Berkala	DPMD : 10 November 2020
40	LPPD DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT	Laporan Keuangan	Berkala	DISTANHORBUN : 10 November 2020
41	PENGADUAN	Pengaduan dan Pelanggaran	Setiap Saat	DPMD : 10 November 2020
42	PENGADUAN DAN PELANGGARAN DPM-PTSP	Pengaduan dan Pelanggaran	Setiap Saat	DPMPTSP : 10 November 2020
43	PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	DISTANHORBUN : 10 November 2020
44	PROGRAM / KEGIATAN	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DPMD : 10 November 2020

45	PROGRAM dan KEGIATAN DPM-PTSP	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DPMPTSP : 10 November 2020
46	REKAPITUASI DPA DISTANHORBUN TA.2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISTANHORBUN : 10 November 2020
47	Ringkasan DPA Tahun 2020 DPM-PTSP	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DPMPTSP : 10 November 2020
48	RUP DPM-PTSP KAB. TANAH LAUT	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DPMPTSP : 10 November 2020
49	SOP KEGIATAN DAN SOP PERIZINAN DPM-PTSP	Hasil Keputusan Badan Publik	Setiap Saat	DPMPTSP : 10 November 2020
50	SOTK	Profil Badan Publik	Berkala	DPMD : 10 November 2020
51	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	DPMD : 10 November 2020
52	LPPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Laporan Keuangan	Berkala	DP2KBP3A : 3 November 2020
53	Rekap Rencana Umum DPM-PTSP	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DP2KBP3A : 3 November 2020
54	DAFTAR PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 2 November 2020
55	SOTK Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 2 November 2020
56	Daftar Pejabat Struktural	Profil Badan Publik	Berkala	DISDUKCAPIL : 30 Oktober 2020
57	Lakip 2019	Lakip 2019	Berkala	DISDUKCAPIL : 30 Oktober 2020
58	Laporan Realisasi Anggaran 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DISDUKCAPIL : 30 Oktober 2020
59	Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Keputusan Badan Publik	Setiap Saat	DISDUKCAPIL : 30 Oktober 2020
60	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Perjanjian Badan Publik dengan Pihak ketiga	Setiap Saat	DISDUKCAPIL : 30 Oktober 2020
61	REKAP PROG DAN KEG TAHUN 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Setiap Saat	DISDUKCAPIL : 30 Oktober 2020
62	RINGKASAN DPA 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Setiap Saat	DISDUKCAPIL : 29 Oktober 2020
63	Daftar Pegawai	Daftar Pegawai di Badan Publik	Berkala	SATPOLPP DAMKAR : 27 Oktober 2020
64	Lakip	LAKIP	Berkala	SATPOLPP DAMKAR : 27 Oktober 2020

65	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DISHUB : 27 Oktober 2020
66	Laporan Real Anggaran DPRKPLH	Laporan Keuangan	Berkala	DPRKPLH : 27 Oktober 2020
67	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan	Berkala	DPRKPLH : 27 Oktober 2020
68	LKPD DPRKPLH	Laporan Keuangan	Berkala	DPRKPLH : 27 Oktober 2020
69	LKPD/LPPD	Laporan Keuangan	Berkala	SATPOLPP DAMKAR : 27 Oktober 2020
70	Pengaduan Dan Pelanggaran DPRKPLH	Pengaduan dan Pelanggaran	Setiap Saat	DPRKPLH : 27 Oktober 2020
71	Program Kegiatan	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	SATPOLPP DAMKAR : 27 Oktober 2020
72	Ringkasan Eksekutif	LAKIP	Berkala	SATPOLPP DAMKAR : 27 Oktober 2020
73	RUP DPRKPLH	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DPRKPLH : 27 Oktober 2020
74	SOTK	Profil Badan Publik	Berkala	SATPOLPP DAMKAR : 27 Oktober 2020
75	Catatan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Th 2019 (Flyer)	Hasil Penelitian	Berkala	DP2KBP3A : 26 Oktober 2020
76	Daftar Pegawai DPRKPLH	Daftar Pegawai di Badan Publik	Berkala	DPRKPLH : 26 Oktober 2020
77	Daftar Pejabat DPRKPLH	Daftar Pejabat di Badan Publik	Berkala	DPRKPLH : 26 Oktober 2020
78	Lakip DPRKPLH	Informasi Kinerja	Berkala	DPRKPLH : 26 Oktober 2020
79	Lakip Tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	DISHUB : 26 Oktober 2020
80	LKPJ & LKPD DPRKPLH	Laporan Keuangan	Berkala	DPRKPLH : 26 Oktober 2020
81	Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Tahun 2020	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DISPAR: 26 Oktober 2020
82	Program/Kegiatan DPRKPLH	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DPRKPLH : 26 Oktober 2020
83	Review SAKIP Tahun 2019	LAKIP	Berkala	DP2KBP3A : 26 Oktober 2020
84	Ringkasan DPA DPRKPLH	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DPRKPLH : 26 Oktober 2020
85	LKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Laporan Keuangan	Berkala	DKPP : 22 Oktober 2020

86	PROGRAM KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISNAKERIND : 22 Oktober 2020
87	Daftar Nama Pegawai Dinas P2KBP3A	Daftar Pegawai di Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
88	Daftar Pegawai pada Dinas Pariwisata Tahun 2020	Daftar Pegawai di Badan Publik	Berkala	DISPAR: 21 Oktober 2020
89	Daftar Pejabat Dinas P2KBP3A	Daftar Pejabat di Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
90	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISNAKERIND : 21 Oktober 2020
91	DRencana Umum Pengadaan Dinas P2KBP3A Tahun 2019	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
92	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	LAKIP	Berkala	DISNAKERIND : 21 Oktober 2020
93	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	Laporan Keuangan	Berkala	DISNAKERIND : 21 Oktober 2020
94	LKPD dan LPPD	Laporan Keuangan	Berkala	DISNAKERIND : 21 Oktober 2020
95	LKPD DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT	Laporan Keuangan	Berkala	DISNAKERIND : 21 Oktober 2020
96	LKPJ Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
97	LPPD DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT	Laporan Keuangan	Berkala	DISNAKERIND : 21 Oktober 2020
98	Perjanjian Kinerja 2020 JFU Diskominfo	Profil Badan Publik	Berkala	DISKOMINFO : 21 Oktober 2020
99	Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2020	Profil Badan Publik	Berkala	DISKOMINFO : 21 Oktober 2020
100	Peta Jabatan Dinas P2KBP3A	Profil Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
101	Renja Diskominfo 2020	Profil Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
102	Ringkasan DPA 2019 Dinas P2KBP3A	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
103	Ringkasan DPA 2020 Dinas P2KBP3A	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
104	RUP 2020 Dinas P2KBP3A	Pengadaan barang	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober

		dan jasa		2020
105	SOTK Dinas P2KBP3A	Profil Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 21 Oktober 2020
106	SOTK DPRKPLH	Profil Badan Publik	Berkala	DPRKPLH : 21 Oktober 2020
107	Daftar Pegawai (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian)	Profil Badan Publik	Berkala	DISNAKERIND : 21 Oktober 2020
108	Hasil Penelitian/Survei Dinas Sosial Kab. Tanah Laut 2020	Hasil Penelitian	Berkala	DINSOS : 20 Oktober 2020
109	Laporan Keuangan (LKPJ dan LPPD)	Laporan Keuangan	Berkala	DISPAR : 20 Oktober 2020
110	Lokasi DPRKPLH	Profil Badan Publik	Berkala	DPRKPLH : 20 Oktober 2020
111	Pengaduan dan Pelanggaran pada Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	Pengaduan dan Pelanggaran	Setiap Saat	DINSOS : 20 Oktober 2020
112	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISPAR : 20 Oktober 2020
113	Prosedur Kerja Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	DINSOS : 20 Oktober 2020
114	RUP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DISNAKERIND : 20 Oktober 2020
115	SOTK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Profil Badan Publik	Berkala	DISNAKERIND : 20 Oktober 2020
116	SOTK pada Dinas Pariwisata	Profil Badan Publik	Berkala	DISPAR : 20 Oktober 2020
117	Penerimaan Pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Non-tunai atau Online di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut	Perjanjian Badan Publik dengan Pihak ketiga	Setiap Saat	DISHUB : 15 Oktober 2020
118	LAKIP	Informasi Kinerja	Berkala	DISKOPDAG : 14 Oktober 2020
119	PENGADAAN BARANG JASA / RUP	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DISPUSIP : 13 Oktober 2020
120	DAFTAR PEGAWAI	Profil Badan Publik	Berkala	DISKOPDAG : 12 Oktober 2020
121	DAFTAR PEJABAT	Profil Badan Publik	Berkala	DISKOPDAG : 12 Oktober 2020
122	LKPJ&LPPD Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DISKOMINFO : 12 Oktober 2020
123	SOP Pelayanan Permintaan Data/Informasi Bappeda	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	BAPPEDA : 12 Oktober 2020

124	SOP Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB P-2	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	BAPPEDA : 12 Oktober 2020
125	SOP SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan dan Pelanggaran	Setiap Saat	BAPPEDA : 12 Oktober 2020
126	SOTK	Profil Badan Publik	Berkala	DISKOPDAG : 12 Oktober 2020
127	DAFTAR PEGAWAI	Profil Badan Publik	Berkala	DISPUSIP : 9 Oktober 2020
128	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut	Laporan Keuangan	Berkala	DKPP : 8 Oktober 2020
129	Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DKPP : 8 Oktober 2020
130	RUP	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DISTANHORBUN : 8 Oktober 2020
131	RUP Diskominfo TA 2020	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DISKOMINFO : 8 Oktober 2020
132	SOTK	Profil Badan Publik	Berkala	DISTANHORBUN : 8 Oktober 2020
133	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT	Profil Badan Publik	Berkala	DISTANHORBUN : 7 Oktober 2020
134	Daftar Nama Pegawai Setda 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	SETDA : 7 Oktober 2020
135	Daftar nama pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Tala	Profil Badan Publik	Berkala	DKPP : 7 Oktober 2020
136	Daftar Nama Pejabat Setda 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	SETDA : 7 Oktober 2020
137	Daftar Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Profil Badan Publik	Berkala	DISPORA : 7 Oktober 2020
138	DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BPBD	Profil Badan Publik	Berkala	BPBD : 7 Oktober 2020
139	Daftar Pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Profil Badan Publik	Berkala	BAPPEDA : 7 Oktober 2020
140	DUK Bappeda per Bulan Oktober 2020	Profil Badan Publik	Berkala	BAPPEDA : 7 Oktober 2020
141	LAKIP	Informasi Kinerja	Berkala	DISPORA : 7 Oktober 2020

142	LAKIP 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut	Informasi Kinerja	Berkala	DKPP : 7 Oktober 2020
143	LAPKIN	Informasi Kinerja	Berkala	DISTANHORBUN : 7 Oktober 2020
144	Laporan Real Anggaran tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	SETDA : 7 Oktober 2020
145	Laporan Real Anggaran Tahun 2020	Laporan Keuangan	Berkala	SETDA : 7 Oktober 2020
146	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan	Berkala	DISPORA : 7 Oktober 2020
147	LAPORAN REALISASI BPBD	Laporan Keuangan	Berkala	BPBD : 7 Oktober 2020
148	LKPD dan LPPD	Laporan Keuangan	Berkala	DISPORA : 7 Oktober 2020
149	PEJABAT STRUKTURAL BPBD	Profil Badan Publik	Berkala	BPBD : 7 Oktober 2020
150	PETA JABATAN	Profil Badan Publik	Berkala	DISTANHORBUN : 7 Oktober 2020
151	Program dan Kegiatan 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DKPP : 7 Oktober 2020
152	Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BAPPENDA : 7 Oktober 2020
153	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	SETDA : 7 Oktober 2020
154	Ringkasan DPA	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DKPP : 7 Oktober 2020
155	Ringkasan DPA	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISPORA : 7 Oktober 2020
156	Ringkasan DPA Bappeda Tahun 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BAPPENDA : 7 Oktober 2020
157	RUP TA 2020	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	SETDA : 7 Oktober 2020
158	SOP Pelayanan Bantuan Hukum	Hasil Keputusan Badan Publik	Setiap Saat	SETDA : 7 Oktober 2020
159	SOTK	Profil Badan Publik	Berkala	DISPORA : 7 Oktober 2020
160	SOTK Sekretariat Daerah	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	SETDA : 7 Oktober 2020
161	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Profil Badan Publik	Berkala	DISPORA : 7 Oktober 2020

162	ALUR/PROSEDUR PELAYANAN KECAMATAN	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
163	Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bapenda Tanah Laut 2020	Profil Badan Publik	Berkala	BAPENDA : 6 Oktober 2020
164	Daftar Pejabat	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
165	DAFTAR PEJABAT BPBD	Profil Badan Publik	Berkala	BPBD : 6 Oktober 2020
166	DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL BAPENDA TANAH LAUT 2020	Profil Badan Publik	Berkala	BAPENDA : 6 Oktober 2020
167	Daftar PNS	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
168	IKM Bappeda 2020	Hasil Penelitian	Berkala	BAPENDA : 6 Oktober 2020
169	IKU Kecamatan Panyipatan	Informasi Kinerja	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
170	Kecamatan Panyipatan Dalam Angka 2019	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
171	Kinerja Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Laporan Realisasi Keuangan s/d September 2020)	Laporan Keuangan	Berkala	DISNAKESWAN : 6 Oktober 2020
172	LAKIP Tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
173	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
174	LKPD - LPPD Bapenda Tanah Laut 2019	Laporan Keuangan	Berkala	BAPENDA : 6 Oktober 2020
175	LKPD BPBD KAB. TANAH LAUT	Laporan Keuangan	Berkala	BPBD : 6 Oktober 2020
176	LKPJ – LPPD	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
177	Perjanjian Kinerja (PK)	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
178	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
179	RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) BAPENDA TANAH LAUT 2020	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	BAPENDA : 6 Oktober 2020
180	Renstra Kecamatan Panyipatan 2018-2023	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
181	Ringkasan DPA Bapenda Tanah Laut TA 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BAPENDA : 6 Oktober 2020

182	RUP BPBD	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	BPBD : 6 Oktober 2020
183	RUP Kantor Kecamatan Panyipatan	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
184	SOP Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	BAPENDA : 6 Oktober 2020
185	SOTK Kecamatan Panyipatan	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. PANYIPATAN : 6 Oktober 2020
186	Daftar Pegawai BKPSDM Kab. Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	BKPSDM : 5 Oktober 2020
187	Daftar Pejabat BKPSDM Kab. Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	BKPSDM : 5 Oktober 2020
188	LAKIP Bappeda Tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	BAPPEDA : 5 Oktober 2020
189	LPPD BKPSDM Kab. Tanah Laut 2019	Laporan Keuangan	Berkala	BKPSDM : 5 Oktober 2020
190	Perbup Nomor 53 Tahun 2017	Profil Badan Publik	Berkala	BAPPEDA : 5 Oktober 2020
191	Program Kegiatan BKPSDM	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BKPSDM : 5 Oktober 2020
192	Ringkasan DPA BKPSDM Kabupaten Tanah Laut 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BKPSDM : 5 Oktober 2020
193	RUP BKPSDM Kab. Tanah Laut	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	BKPSDM : 5 Oktober 2020
194	SOTK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Profil Badan Publik	Berkala	BAPPEDA : 5 Oktober 2020
195	Susunan Organisasi Tata Kerja	Profil Badan Publik	Berkala	BKPSDM : 5 Oktober 2020
196	IKU 2019 DINSOS	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DINSOS : 14 September 2020
197	RENSTRA DINAS SOSIAL 2018-2023	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DINSOS : 10 September 2020
198	Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo	Informasi Darurat	Berkala	DISKOMINFO : 18 Agustus 2020
199	Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2019	Informasi Darurat	Berkala	DISKOMINFO : 18 Agustus 2021
200	Matrik Keselarasan Dinas Kominfo Tahun 2019	Informasi Darurat	Berkala	DISKOMINFO : 18 Agustus 2022
201	Matrik Rencana Aksi Dinas Kominfo Tahun 2019	Informasi Darurat	Berkala	DISKOMINFO : 18 Agustus 2023

202	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019	Informasi Darurat	Berkala	DISKOMINFO : 18 Agustus 2024
203	Pohon Kinerja Dinas Kominfo	Informasi Darurat	Berkala	DISKOMINFO : 18 Agustus 2025
204	Rencana Kerja Dinas kominfo Tahun 2019	Informasi Darurat	Berkala	DISKOMINFO : 18 Agustus 2026
205	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	Informasi Darurat	Berkala	DISKOMINFO : 18 Agustus 2027
206	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2020	Hasil Penelitian	Berkala	DISKOMINFO : 8 Agustus 2020
207	LAK LKPD 2019 AUDITED	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 3 Agustus 2020
208	LO LKPD 2019 AUDITED	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 3 Agustus 2020
209	LPE LKPD 2019 AUDITED	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 3 Agustus 2020
210	LPSAL LKPD 2019 AUDITED	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 3 Agustus 2020
211	LRA LKPD 2019 AUDITED	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 3 Agustus 2020
212	NERACA LKPD 2019 AUDITED	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 3 Agustus 2020
213	Data Jumlah KIM di kabupaten Tanah Laut tahun 2018	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISKOMINFO : 19 Juli 2020
214	SKM Bapenda Kab. Tanah Laut 2020	Hasil Penelitian	Berkala	BAPENDA : 16 Juli 2020
215	SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda Kab. Tanah Laut	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BAPENDA : 16 Juli 2021
216	SOP Penagihan Piutang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BAPENDA : 16 Juli 2022
217	Lakip BKPSDM Kabupaten Tanah Laut 2019	Laporan Keuangan	Berkala	BKPSDM : 27 Juni 2020
218	LRA dan LKPD BKPSDM Kabupaten Tanah Laut 2019	Laporan Keuangan	Berkala	BKPSDM : 27 Juni 2020
219	Perbub Uraian Tugas BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	BKPSDM : 27 Juni 2020
220	Susunan Organisasi dan Tata Kerja	Profil Badan Publik	Berkala	DISDUKCAPIL : 16 Mei 2020
221	Daftar Norminatif PNS	Profil Badan Publik	Berkala	DISDUKCAPIL : 6 Mei 2023
222	Data Agregat Semester 2 Tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	DISDUKCAPIL : 6 Mei 2024
223	Maklumat Pelayanan	Profil Badan Publik	Berkala	DISDUKCAPIL : 6 Mei

				2026
224	Susunan Organisasi dan Tata Kerja	Profil Badan Publik	Berkala	DISDUKCAPIL : 6 Mei 2026
225	Uraian Tugas	Profil Badan Publik	Berkala	DISDUKCAPIL : 6 Mei 2026
226	Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut Tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	DINKES : 27 April 2020
227	RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT 2019 – 2023	Profil Badan Publik	Berkala	DINKES : 27 April 2020
228	Daftar Pegawai Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	DPUPRP : 23 April 2021
229	Daftar Pejabat Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	DPUPRP : 23 April 2022
230	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DPUPRP : 23 April 2023
231	LAKIP Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut Tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	DPUPRP : 23 April 2024
232	Perbup Uraian Tugas Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	DPUPRP : 23 April 2020
233	SOTK Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut	Profil Badan Publik	Berkala	DPUPRP : 23 April 2021
234	LAPORAN KEUANGAN (KINERJA) DISNAKESWAN per Maret 2020	Laporan Keuangan	Berkala	DISNAKESWAN : 7 April 2020
235	JENIS PENGADUAN DAN PELANGGARAN BPBD KAB. TANAH LAUT	Pengaduan dan Pelanggaran	Setiap Saat	BPBD : 6 April 2020
236	PENGADAAN BARANG DAN JASA BPBD KAB. TANAH LAUT	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	BPBD : 6 April 2020
237	SOTK ( SUSUNAN ORGANISASI TATAKERJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT	Regulasi	Setiap Saat	DKPP : 6 April 2020

238	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD)	Informasi Kinerja	Berkala	SETDA : 1 April 2020
239	LAKIP Sekretariat Daerah 2019	Informasi Kinerja	Berkala	SETDA : 1 April 2020
240	LKPD & LPPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laporan Keuangan	Berkala	DISPUSIP : 1 April 2020
241	Pengukuran Kinerja Triwulan I-IV Sekretariat Daerah	Informasi Kinerja	Berkala	SETDA : 1 April 2020
242	Perjanjian Kinerja Pelaksana ASN Sekretariat Daerah	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	SETDA : 1 April 2020
243	Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	SETDA : 31 Maret 2020
244	REKAP BENCANA DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Serta Merta	DINSOS : 31 Maret 2027
245	SOTK Dinas Kesehatan	Profil Badan Publik	Berkala	DINKES : 31 Maret 2020
246	Daftar ASN Dinsos 2020	Profil Badan Publik	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020
247	LAKIP DINAS SOSIAL 2019	Informasi Kinerja	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020
248	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS SOSIAL 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020
249	LKPJ DAN LPPD DINAS SOSIAL 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020
250	PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020
251	REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN 2020 DINAS SOSIAL TALA	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020
252	RINGKASAN DPA DINAS SOSIAL 2019	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020
253	RINGKASAN DPA DINAS SOSIAL 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020
254	STRUKTUR ORGANISASI DINSOS 2020	Profil Badan Publik	Berkala	DINSOS : 27 Maret 2020

255	CALK Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Keuangan	Berkala	DP2KBP3A : 26 Maret 2020
256	DAFTAR PEJABAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Profil Badan Publik	Berkala	DISPUSIP : 26 Maret 2020
257	DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL BPBD	Profil Badan Publik	Berkala	BPBD : 26 Maret 2020
258	LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Th 2019	Informasi Kinerja	Berkala	DP2KBP3A : 26 Maret 2020
259	Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	INSPEKTORAT : 26 Maret 2020
260	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) T	Informasi Kinerja	Berkala	BPBD : 26 Maret 2020
261	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DISPUSIP : 26 Maret 2020
262	LPPD Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DP2KBP3A : 26 Maret 2020
263	LPPD-LKPJ 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Keuangan	Berkala	DP2KBP3A : 26 Maret 2020
264	Nama Program & Kegiatan	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISNAKESWAN : 26 Maret 2020
265	Nama Program & Kegiatan	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISNAKESWAN : 26 Maret 2020
266	Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	INSPEKTORAT : 26 Maret 2020
267	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020	Regulasi	Setiap Saat	INSPEKTORAT : 26 Maret 2020
268	Rekavitulasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa diskominfo tahun 2020	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	DISKOMINFO : 26 Maret 2020

269	RINGKASAN DPA	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISNAKESWAN : 26 Maret 2020
270	RINGKASAN DPA TAHUN ANGGARAN 2020 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BPBD : 26 Maret 2020
271	Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	KEC. KINTAP : 26 Maret 2020
272	SOTK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Profil Badan Publik	Berkala	DISPUSIP : 26 Maret 2020
273	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BPBD	Profil Badan Publik	Berkala	BPBD : 26 Maret 2020
274	Struktur Organisasi	Profil Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 26 Maret 2020
275	DAFTAR PEGAWAI DINAS PETERNAKAN & KESWAN	Profil Badan Publik	Berkala	DISNAKESWAN : 25 Maret 2020
276	DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL DINKES KABUPATEN TANAH LAUT	Profil Badan Publik	Berkala	DINKES : 24 Maret 2020
277	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DINKES : 24 Maret 2020
278	Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin (Per 28 Februari 2020)	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. BAJUIN : 24 Maret 2020
279	Ringkasan DPA Diskominfo Tahun 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISKOMINFO : 19 Maret 2020
280	Ringkasan DPA Perubahan Diskominfo Tahun 2019	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DISKOMINFO : 19 Maret 2020
281	Kegiatan dan Program BPKAD TA. 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BPKAD : 18 Maret 2020
282	LAKIP BPKAD Kab. Tanah Laut Tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	BPKAD : 18 Maret 2020
283	LAKIP Diskominfo kabupaten Tanah Laut tahun 2019	Informasi Kinerja	Berkala	DISKOMINFO : 18 Maret 2020
284	LAPORAN REALISASI ANGGARAN BPKAD PER 31 DESEMBER 2019	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 18 Maret 2020
285	Laporan Realisasi Anggaran Diskominfo Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DISKOMINFO : 18 Maret 2020

286	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Diskominfo Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	DISKOMINFO : 18 Maret 2020
287	LKPJ BPKAD Kab. Tanah Laut Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 18 Maret 2020
288	LPPD BPKAD Kab. Tanah Laut Tahun 2019	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 18 Maret 2020
289	Rekapitulasi RUP BPKAD TA. 2020	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	BPKAD : 18 Maret 2020
290	Ringkasan DPA-BPKAD 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	BPKAD : 18 Maret 2020
291	Struktur Organisasi Dinas Peternakan & Keswan	Profil Badan Publik	Berkala	DISNAKESWAN :18 Maret 2020
292	CALK KECAMATAN JORONG TA.2019	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. JORONG : 17 Maret 2020
293	LAPORAN OPERASIONAL TH.2019 DAN 2018	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. JORONG : 17 Maret 2020
294	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TA.2019	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. JORONG : 17 Maret 2020
295	LAPORAN REALISASI ANGGARAN,PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2019 DAN 2018	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. JORONG : 17 Maret 2020
296	LKPJ-LPPD KECAMATAN JORONG TAHUN 2019	Laporan Keuangan	Berkala	KEC. JORONG : 17 Maret 2020
297	DAFTAR PEGAWAI-ASN BPKAD KAB. TANAH LAUT	Profil Badan Publik	Berkala	BPKAD : 16 Maret 2020
298	DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL BPKAD KAB. TANAH LAUT	Profil Badan Publik	Berkala	BPKAD : 16 Maret 2020
299	Daftar Pejabat Struktural Kecamatan Pelaihari	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. PELAIHARI : 16 Maret 2020
300	DISNAKERIND	Laporan Keuangan	Berkala	DISNAKERIND : 16 Maret 2020
301	DISNAKERIND LAKIP	Informasi Kinerja	Berkala	DISNAKERIND : 16 Maret 2020
302	STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KAB. TANAH LAUT	Profil Badan Publik	Berkala	BPKAD : 16 Maret 2020
303	Struktur Organisasi dan Peta Jabatan Dinas Kominfo Tahun 2020	Profil Badan Publik	Berkala	DISKOMINFO : 16 Maret 2020
304	Susunan Pegawai dan Pejabat Dinas Kominfo Tahun 2020	Profil Badan Publik	Berkala	DISKOMINFO : 16 Maret 2020

305	Daftar Pejabat	Profil Badan Publik	Berkala	DISNAKESWAN : 14 Maret 2020
306	LAKIP TAHUN 2019 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Informasi Kinerja	Berkala	BPBD : 12 Maret 2020
307	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	Laporan Keuangan	Berkala	BPBD : 12 Maret 2020
308	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	DISHUB : 12 Maret 2020
309	STRUKTUR ORGANISASI BPBD	Profil Badan Publik	Berkala	BPBD : 12 Maret 2020
310	Success Story Book	Informasi Kinerja	Berkala	DISNAKESWAN : 12 Maret 2020
311	DATA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JORONG	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. JORONG : 11 Maret 2020
312	KLASIFIKASI JABATAN PNS KANTOR KECAMATAN JORONG	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. JORONG : 11 Maret 2020
313	PETA JABATAN PNS KANTOR KECAMATAN JORONG TAHUN 2020	Profil Badan Publik	Berkala	KEC. JORONG : 11 Maret 2020
314	REKAPITULASI RUP TA.2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	KEC. JORONG : 11 Maret 2020
315	RINGKASAN DPA KANTOR KECAMATAN JORONG TA.2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	KEC. JORONG : 11 Maret 2020
316	LRA 2019	Laporan Keuangan	Berkala	BPKAD : 28 Januari 2020
317	PERDA APBD TA. 2020	Laporan Keuangan	Berkala	BAPPEDA : 28 Januari 2020
318	RKPD 2020	Program dan Kegiatan di Badan Publik	Berkala	DP2KBP3A : 24 Januari 2020

- **Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi**

Terealisasi sebanyak 3 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan target 3 KIM, sehingga persentase realisasi telah tercapai 100%. Pada tahun 2020 ini diperoleh jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi berjumlah 3 Kelompok dengan

target tahun 2020 yaitu 3 KIM, sehingga diperoleh nilai realisasi yaitu 100 %. Sedangkan pada tahun 2019 telah terbentuk 4 KIM. Pada tahun 2020 ini capaian target berhasil tercapai sesuai target. Permasalahan yang dihadapi yakni masih adanya wilayah yang tidak memiliki jaringan internet yang baik atau wilayahnya tidak terjangkau internet sehingga terkendala saat mempublikasikan informasi melalui media website ataupun media sosial lainnya. Untuk selanjutnya Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ini terus dilakukan pembenahan dan peningkatan dalam bentuk desa informatik dengan menjalin koordinasi dengan Kepala Desa dan Camat serta masyarakat untuk turut mendukung program Kota ditata Desa dibina.

- **Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa daerah radio, media sosial dan website pemerintah**

Terealisasi sebanyak 1093 informasi/berita (target 720 informasi) dan juga terealisasi melebihi target dengan persentase 152%. Informasi yang disebarluaskan melalui media massa pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui yaitu melalui Media atau portal website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selain keberhasilan juga terdapat kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan peliputan berita/informasi dan kurangnya SDM dalam bidang jurnalistik. Strategi kedepan yang dipersiapkan adalah pengusulan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang

kelancaran peliputan serta menambah tenaga pelaksana pemberitaan/jurnalis.

Tabel 3.11 Rekap informasi/berita pada website  
tanahlautkab.go.id tahun 2020

NO.	BULAN	Banyaknya Informasi
1.	Januari	82
2.	Februari	70
3.	Maret	101
4.	April	112
5.	Mei	116
6.	Juni	133
7.	Juli	135
8.	Agustus	106
9.	September	51
10.	Oktober	57
11.	Nopember	74
12.	Desember	56
TOTAL		1093

*d) Analisis Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Menyiapkan pelaksanaan Forum konsultasi publik melalui siaran radio pada program dialog interaktif dalam program Tanah Laut Menyapa, Pojok UMKM, Halo Dokter, Halo Polisi dengan menghadirkan narasumber dari SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat.
3. Melaksanakan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Melaksanakan penyebaran informasi melalui media sosial dan radio Tuntung Pandang FM Pelaihari.

5. Membentuk Tim Pencanangan dan Pembinaan Desa Informatik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Guna Mendukung Program Desa Dibina Kota Ditata.
6. Melaksanakan peningkatan fasilitas ruangan Radio beserta peralatan penunjangnya.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp 562.316.273,- dari pagu program Rp 589.195.472,- dengan persentase capaian 95,44 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 26.879.199,-

*f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Dukungan penuh dari Kepala Dinas dalam memberikan arahan dan inovasi untuk perbaikan pengelolaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.
- Perbaikan sarana dan prasarana pada Radio Tuntung Pandang FM dalam rangka peningkatan kualitas sinyal dan suara bagi pendengar radio.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik pada kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat dianggarkan pada Triwulan I 70%, Triwulan II 10% dan triwulan III 20%.

- Rencana aksi kinerja pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik pada kegiatan Penyebarluasan dilaksanakan pada Triwulan I 20%, Triwulan II 20%, Triwulan III 30% dan Triwulan IV 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

*h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik khususnya untuk tenaga penyiar radio.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis pengelolaan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis penyiaran dan pengelola informasi publik.
- Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait pengelola informasi

5.4 Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan layanan komunikasi publik	Jumlah data layanan jaringan komunikasi publik	12 dokumen	12 dokumen	100 %	10 dokumen
		Jumlah konten lokal maupun	720 konten	1093 konten	152 %	50 permohonan

		nasional yang dibuat dan siap dipublikasikan				
Rata-Rata Capaian					126 %	

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian kinerja Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dalam Kegiatan pelaksanaan pengelolaan layanan komunikasi publik dengan indikator jumlah data layanan jaringan komunikasi publik terealisasi 12 dokumen dengan target 12 dokumen sehingga persentasenya 100%, sedangkan jumlah konten lokal maupun nasional yang dibuat dan siap dipublikasikan telah tercapai 1093 konten dari target 720 konten sehingga tercapai melebihi 126%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Kinerja kegiatan pengelolaan saluran komunikasi Publik telah terlaksana dengan hasil yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan.

*b) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**1) Jumlah data layanan jaringan komunikasi publik**

Terealisasi sebanyak 12 dokumen dengan target 12 dokumen, yang berarti telah terealisasi 100%. Data layanan jaringan komunikasi publik diperoleh melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya. Dengan adanya pendataan tersebut dapat memberikan manfaat guna menentukan target retribusi dan ketersediaan data menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Untuk kedepannya akan dilakukan pengawasan secara intensif dengan menambah mobilitas dalam rangka menunjang akurasi data dan menghubungi pihak pemilik menara yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

2) **Jumlah konten lokal maupun nasional yang dibuat dan siap dipublikasikan**

Terealisasi sebanyak 1093 konten dengan target 720 konten, yang berarti realisasi telah melebihi target 100% dengan persentase capaian 152 %, terjadi peningkatan yang melampaui target yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan sulitnya penentuan target tahunan terhadap konten informasi yang kadang meningkat ataupun menurun. Adapun permasalahan yang sering dihadapi ialah kurangnya sarana prasarana penunjang untuk peliputan atau pengumpulan data informasi untuk membuat konten berita serta kurangnya SDM yang dimiliki pada Dinas Kominfo terkait jurnalistik.

c) *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media sosial fanpage Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan portal website Tanah Laut di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut [www.portal.tanahlautkab.go.id](http://www.portal.tanahlautkab.go.id).
2. Pro-Aktif dalam penyebarluaskan informasi valid dan cegah isu *hoax* virus corona melalui media pemerintah daerah.
3. Membentuk Tim Pencanaan dan Pembinaan Desa Informatik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Guna Mendukung Program Desa Dibina Kota Ditata.
4. Melaksanakan pembinaan bagi jurnalis dalam rangka perbaikan kepenulisan berita.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.971.713,- dari pagu kegiatan Rp 30.280.000,- dengan persentase capaian 52,75 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 14.308.287,-

*e) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik pada kegiatan Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi dianggarkan pada Triwulan I 70%, Triwulan II 10% dan triwulan III 20%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik pada kegiatan Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi dilaksanakan pada Triwulan I 20%, Triwulan II 20%, Triwulan III 30% dan Triwulan IV 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

*f) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, diantaranya:

- Terlambatnya pemutkahiran dan pendataan menara guna menentukan target retribusi dan ketersediaan data menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

- Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk peliputan atau pengumpulan data informasi untuk membuat konten berita.
- Kurangnya SDM yang dimiliki pada Dinas Kominfo terkait jurnalistik.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengawasan secara intensif dengan menambah mobilitas dalam rangka menunjang akurasi data dan menghubungi pihak pemilik menara yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut
- Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk peliputan atau pengumpulan data informasi.
- Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait jurnalistik.

#### 5.5 Kepala Seksi Infastruktur dan Teknologi

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Memfasilitasi dan memberikan layanan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1 unit	1 unit	100 %	5 unit
Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan e-government		10 SKPD	8 SKPD	80 %	20 SKPD	
Jumlah permohonan fasilitasi pengembangan inovasi		4 SKPD	4 SKPD	100 %	15 SKPD	

Rata-Rata Capaian	93,33 %	
-------------------	---------	--

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian kinerja Seksi Infrastruktur dan teknologi dalam Kegiatan pelaksanaan memfasilitasi dan memberikan layanan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang SPBE di Kabupaten Tanan Laut adalah 93,33 % dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) terealisasi 1 unit dengan target 1 unit sehingga persentase capaiannya 100%, Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan e-government telah tercapai 8 SKPD dari target 10 SKPD sehingga tercapai 80%, sedangkan Jumlah permohonan fasilitasi pengembangan inovasi telah tercapai 4 SKPD dengan target 4 SKPD sehingga capaiannya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Kinerja kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi telah terlaksana dengan hasil yang diperoleh mendekati target yang ditetapkan.

*b) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**1) Jumlah sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

Terealisasi sebanyak 1 unit dengan target 1 unit, yang berarti telah terealisasi 100%. Sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE diperoleh melalui proses perencanaan pengadaan pada APBD Perubahan Tahun 2020 pada kegiatan pembinaan jaringan komunikasi dan media massa. Dengan tersedianya server untuk *backup mirroring* aplikasi Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk beberapa aplikasi serta dengan telah terbangunnya gedung Network Operation Center sehingga akan memudahkan dalam pengelolaan jaringan yang lebih representatif.

Permasalahan yang dihadapi ialah keberhasilan penggunaan jaringan terpadu oleh seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya akan dilaksanakan penerapan jaringan internet dan intranet terpadu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna mengoptimalkan pengelolaan internet serta penggunaan jaringan intra antar SKPD.

## **2) Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan E-Government**

Terealisasi sebanyak 8 SKPD dengan target 10 SKPD, meskipun belum tercapai sesuai target namun Dinas Kominfo telah mengupayakan penggunaan jaringan e-government ini dapat terpenuhi untuk seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam percepatan implementasi SPBE baru bisa dilakukan oleh beberapa SKPD (BKPSDM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Kurau dan Bappeda, BPKAD, serta Sekretariat Kabupaten Tanah Laut). Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah Struktur Geografis di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan Dataran tinggi dan kurang tingginya tower Diskominfo menyebabkan beberapa kecamatan tidak bisa terjangkau Jaringan Wireless. Langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu perlu adanya tower yang tingginya minimal 70 meter sesuai DED Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2019.

## **3) Jumlah permohonan fasilitasi pengembangan inovasi**

Terealisasi sebanyak 4 SKPD dengan target 4 SKPD, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Permohonan

fasilitasi pengembangan fasilitasi ini diproses dengan adanya surat resmi dari SKPD yang meminta fasilitasi dalam pengembangan inovasi menggunakan teknologi informasi. Proses fasilitasi sendiri dilakukan oleh bidang penyelenggaraan E-government, sehingga hasilnya dapat langsung dilakukan penyediaan hosting domain atas inovasi yang dihasilkan. Namun dalam prosesnya juga dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

c) *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan penyediaan layanan internet dan layanan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
2. Menyiapkan administrasi layanan internet gratis di fasilitas umum di wilayah Pelaihari
3. Melaksanakan penyediaan layanan-layanan terkait teknologi dan informasi bagi seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya pengembangan aplikasi, jaringan, integrasi data, layanan *hosting*, *colocation server* dan digitalisasi.
4. Melaksanakan kerjasama dengan Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government.
5. Melaksanakan penyediaan fasilitas video conference bagi SKPD di Lingkup Kabupaten Tanah Laut.
6. Menyiapkan administrasi pembangunan jaringan fiber optik dan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Melaksanakan peningkatan SDM aparatur dengan mengadakan diklat intern urusan teknologi informasi.

8. Menyiapkan administrasi pembangunan Ruang Network Operation Center (NOC) beserta fasilitas penunjangnya.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan teknologi hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.844.525.495,- dari pagu kegiatan Rp 3.028.089.600,- dengan persentase capaian 93,94 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 183.564.105,-.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Telah terbangunnya jaringan intra terpadu seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Telah terbangunnya ruang network operation center (NOC) untuk pengelolaan pusat jaringan.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Infrastruktur dan Jaringan pada Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dianggarkan pada Triwulan I 20%, Triwulan II 45% Triwulan III 10% dan triwulan IV 25%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Infrastruktur dan Jaringan pada Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dilaksanakan pada

Triwulan II 10%, Triwulan III 10% dan Triwulan IV 5% menyesuaikan anggaran kegiatan.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Infrastruktur dan Jaringan, diantaranya:

- Struktur Geografis di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan Dataran tinggi dan kurang tingginya tower Diskominfo menyebabkan beberapa kecamatan tidak bisa terjangkau Jaringan Wireless

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Kedepannya akan dilaksanakan penerapan jaringan internet dan intranet terpadu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna mengoptimalkan pengelolaan internet serta penggunaan jaringan intra antar SKPD.
2. Langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu perlu adanya tower yang tingginya minimal 70 meter.

5.6 Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSentase CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Memfasilitasi dan memberikan layanan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah permohonan penggunaan domain tanahlautkab.go.id	2 SKPD	4 SKPD	200 %	2 SKPD
		Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	2 aplikasi

		SPBE				
		Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan aplikasi daerah	40 SKPD	40 SKPD	100 %	40 SKPD
Rata-Rata Capaian						

a) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

Rata-rata capaian kinerja Seksi pengembangan aplikasi dalam kegiatan pelaksanaan memfasilitasi dan memberikan layanan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut adalah 133 % dengan indikator jumlah permohonan penggunaan domain tanahlautkab.go.id terealisasi 4 SKPD dengan target 2 SKPD sehingga persentasenya 200%, Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE telah tercapai 2 aplikasi dari target 2 aplikasi sehingga tercapai 100%, sedangkan Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan aplikasi daerah telah tercapai 40 SKPD dengan target 40 SKPD sehingga capaiannya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kinerja kegiatan seksi pengembangan aplikasi telah terlaksana dengan hasil yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan.

b) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah permohonan penggunaan domain tanahlautkab.go.id**

Terealisasi sebanyak 6 SKPD dengan target 2 SKPD, yang berarti telah terealisasi 200% melebihi target yang ada. Penggunaan domain tanahlautkab.go.id bertujuan agar SKPD memakai domain resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Terealisasinya permohonan domain dari SKPD Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan dengan koordinasi sehingga permohonan dapat terfasilitasi dengan baik. Kedepannya telah dibuat Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi Daerah sehingga penggunaan sistem informasi/aplikasi mempunyai payung hukum yang jelas.

- **Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE**

Terealisasi sebanyak 2 aplikasi dengan target 2 aplikasi, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Pada tahun 2020 ini telah dikembangkan dan dikelola dua buah aplikasi penunjang e-government, yaitu penerapan aplikasi tata naskah dinas elektronik dalam versi website dan juga mobile. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah perlunya pembiasaan dalam penggunaan Sistem Tata Naskah Dinas ini di Kabupaten Tanah Laut di mana saat ini sebagian besar SKPD masih menggunakan metode manual sehingga perlu dilakukan Bimtek dan sosialisasi kembali.

- **Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan aplikasi daerah**

Terealisasi sebanyak 40 SKPD dengan target 40 SKPD, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Adanya pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif kepada 40 SKPD dalam pengelolaan aplikasi tata naskah dinas elektronik Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya perlu anggaran dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut.

*c) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Pengelolaan aplikasi e-lapor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kerjasama Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government.
3. Pembuatan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
4. Melaksanakan pengelolaan database pada aplikasi.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik sebagai berikut Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 103.958.150,- dari pagu kegiatan Rp 119.800.000,- dengan persentase capaian 86,78 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 15.841.850,-.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Pengembangan Aplikasi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Koordinasi dari seluruh tim IT Dinas Kominfo dalam melaksanakan fasilitasi maupun penyusunan aplikasi /sistem informasi penunjang pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Pengembangan Aplikasi pada Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi dianggarkan pada Triwulan I 20%, Triwulan II 45% Triwulan III 10% dan triwulan IV 25%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Pengembangan Aplikasi pada Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi dilaksanakan pada Triwulan II 10%, Triwulan III 10% dan Triwulan IV 5% menyesuaikan anggaran kegiatan.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Pengembangan Aplikasi, diantaranya:

1. Belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang pembangunan aplikasi di Kabupaten Tanah Laut.
2. Kurangnya personil pada seksi pengembangan aplikasi yang menguasai ilmu pemrograman.
3. Minimnya anggaran untuk pembangunan aplikasi penunjang SPBE.
4. SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan aplikasi daerah.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi Daerah sehingga penggunaan sistem

informasi/aplikasi mempunyai payung hukum yang jelas.

2. Melakukan sosialisasi ataupun bimtek terkait aplikasi yang telah dibangun secara intensif ke SKPD.
3. Peningkatan anggaran pembuatan aplikasi guna menunjang implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
4. Peningkatan SDM personil yang ada dalam hal pengelolaan aplikasi daerah.

### 5.7 Kepala Seksi Persandian

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	Jumlah SKPD yang paham tentang pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	40 SKPD	1 SKPD	2,5 %	5 SKPD
		Jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dengan menerapkan sertifikat elektronik	20 SKPD	2 SKPD	10%	10 SKPD
		Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi	1 kali	0 kali	0 %	5 kali
Rata-Rata Capaian					4,16 %	

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Seksi Persandian tahun 2020 hanya sebesar 4,16%. Terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Jumlah SKPD yang paham tentang pengelolaan persandian dan keamanan informasi dengan target 40 SKPD tercapai 2,5% (1 SKPD), indikator Jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dengan menerapkan sertifikat elektronik dengan target 20 SKPD tercapai 10% (2 SKPD), dan indikator Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi target 1 kali tercapai 0% (0 kali).

b) *Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan pencapaian target tahun 2020 dengan tahun 2019 terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator jumlah SKPD yang paham tentang persandian tahun 2019 masih sangat minim, karena kegiatan belum terlaksana secara optimal dan tahun 2019 memang tercapai 100% namun dengan target yang sangat kecil yaitu hanya 1 SKPD, indikator jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi tahun 2019 tercapai 10% (2 SKPD) dari target yang ada, dan indikator jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi tahun 2019 tidak tercapai disebabkan ada kendala teknis kesiapan dari Dinas Kominfo dan dari pemateri yang tidak bisa dihadirkan ke Kabupaten Tanah Laut terkait adanya pandemi Covid-19.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah SKPD yang paham tentang pengelolaan persandian dan keamanan informasi**

Jumlah SKPD yang paham tentang Persandian tercapai 1 SKPD pada tahun 2020 (2,5%) sedang pada

tahun 2019 juga hanya 1 SKPD. Minimnya capaian kinerja ini karena SKPD yang paham tentang pengelolaan Persandian dan keamanan informasi ini memerlukan prosedur yang harus dipenuhi oleh SKPD. SKPD yang telah memahami tentang pentingnya persandian dan keamanan informasi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

- **Jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dengan menerapkan sertifikat elektronik**

Terealisasi sebanyak 2 SKPD dengan target 20 SKPD, yang berarti realisasi hanya mencapai 10%. Hal ini diperoleh dari pelaksanaan pengamanan informasi pada dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- **Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi**

Pelaksanaan sosialisasi persandian dan keamanan informasi ini tidak dapat terealisasi/tercapai disebabkan ada kendala teknis kesiapan dari Dinas Kominfo dan dari pemateri yang tidak bisa dihadirkan ke Kabupaten Tanah Laut terkait adanya pandemi Covid-19. Sehingga akan lebih difokuskan pada tahun 2021. Langkah kedepan yang akan dilakukan dengan melakukan pelatihan ataupun bimtek tentang persandian dan keamanan informasi.

*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan inventarisasi seluruh SKPD untuk diusulkan penggunaan tanda tangan elektronik ke BSSN.
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan personil yang ada dalam memahami tentang persandian dan keamanan informasi.
3. Melakukan rapat koordinasi terkait pengelolaan sandi di daerah secara virtual.
4. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang pentingnya keamanan informasi.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Persandian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada kegiatan Fasilitasi persandian dan pengamanan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.387.600,- dari pagu program Rp 3.637.600,- dengan persentase capaian 93,13 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 250.000,-.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Persandian dapat dikatakan sangat minim mengingat minimnya anggaran yang ada pada seksi persandian namun tahun 2020 telah diupayakan beberapa hal diantaranya:

- Minimnya tenaga personil yang ada pada seksi Persandian sehingga hanya dapat melaksanakan tahap awal pengusulan pemanfaatan persandian dengan menggunakan tanda tangan elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

- Melaksanakan peningkatan SDM pada seksi Persandian dengan mengikuti kegiatan pelatihan maupun bimtek secara virtual.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Persandian pada Kegiatan Fasilitasi persandian dan pengamanan informasidianggarkan pada Triwulan I 100%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Pengembangan Aplikasi pada Kegiatan Fasilitasi persandian dan pengamanan informasi dilaksanakan pada Triwulan I 50%.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Komunikasi, diantaranya:

1. Kurangnya personil yang ada pada Seksi Persandian khususnya untuk jabatan fungsional Sandiman maupun operator Sandi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis persandian dan keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
4. Belum tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Persandian dan keamanan informasi pada bidang Statistik dan Persandian.

2. Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait Persandian dan Keamanan Informasi.
3. Melakukan sosialisasi tentang Persandian dan pentingnya keamanan informasi.
4. Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

## 5.8 Kepala Seksi Pengelolaan Statistik

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSentase CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengisian indikator pada aplikasi Satu Data Tanah Laut	Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	1 aplikasi
		Jumlah buku Data Statistik Sektoral	1 buku	1 buku	100%	1 buku
		Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut	20 orang	20 orang	100 %	20 orang
Rata-Rata Capaian					100 %	

### a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Seksi Pengelolaan Statistik tahun 2020 telah tercapai 100%. Terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai dengan target 1 aplikasi tercapai 100% (1 aplikasi), indikator Jumlah buku Data Statistik Sektoral dengan target 1 buku tercapai 100% (1 buku), dan indikator Jumlah Admini Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen

aplikasi Satu Data Tanah Laut telah tercapai 100% (20 orang).

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

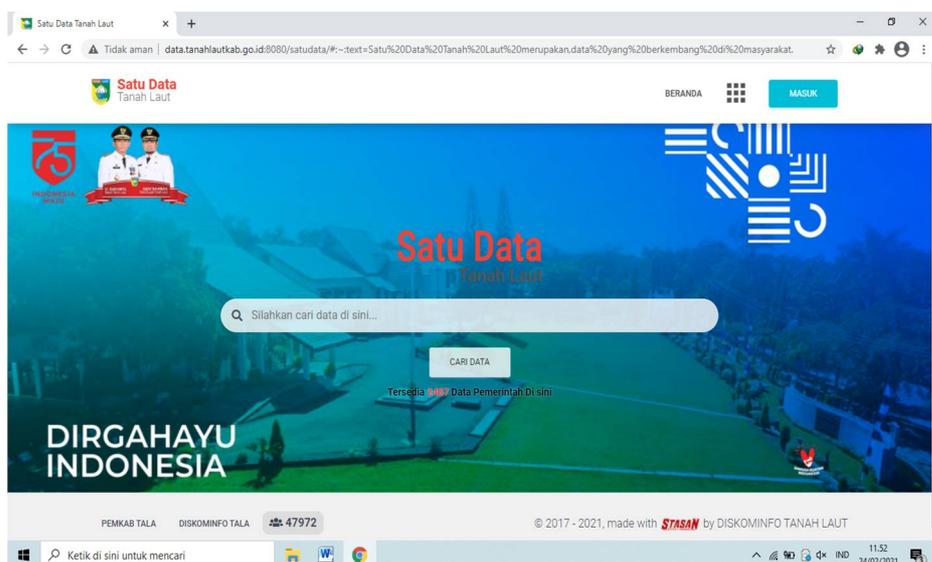
Perbandingan pencapaian target tahun 2020 dengan tahun 2019 terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator jumlah SKPD yang paham tentang persandian tahun 2019 masih sangat minim, karena kegiatan belum terlaksana secara optimal dan tahun 2019 memang tercapai 100% namun dengan target yang sangat kecil yaitu hanya 1 SKPD, indikator jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi tahun 2019 tercapai 10% (2 SKPD) dari target yang ada, dan indikator jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi tahun 2019 tidak tercapai disebabkan ada kendala teknis kesiapan dari Dinas Kominfo dan dari pemateri yang tidak bisa dihadirkan ke Kabupaten Tanah Laut terkait adanya pandemi Covid-19.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai**

Terealisasi sebanyak 1 aplikasi dengan target 1 aplikasi, yang berarti telah terealisasi 100%. Tersedianya aplikasi Satu Data yang memadai bertujuan agar data yang tersedia dapat akurat dan dipertanggungjawabkan. Beberapa data dari beberapa SKPD dikumpulkan ke dalam satu sistem aplikasi yaitu aplikasi Satu Data yang diinputkan langsung oleh masing-masing admin SKPD sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan data yang mendasar. Kedepannya Aplikasi Satu Data masih harus dikembangkan seiring berkembangnya kebutuhan-

kebutuhan data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.



- **Jumlah buku data statistik sektoral**

Terealisasi sebanyak 1 buku dengan target 1 buku, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Keberhasilan atas capaian ini merupakan usaha dari seluruh elemen terkait dalam usaha mengumpulkan dan meninputkan data ke dalam Aplikasi Satu Data Tanah Laut. Dari seluruh data yang terhimpun akan diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sektoral oleh analis statistik dan Kepala Seksi Pengelolaan Statistik sesuai bimbingan Kepala Bidang Statistik dan Persandian serta arahan dari Kepala Dinas Kominfo, kemudian data tersebut disusun menjadi buku data statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut atau diberi nama ikhtisar statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah perlunya menambah wawasan bagi admin Satu Data Tanah Laut dalam pengelolaan data karena data dalam aplikasi perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi

statistik yang bisa dipublikasikan sehingga perlu penyusunan buku-buku statistik yang lain.

- **Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut**

Terealisasi sebanyak 20 orang dengan target 20 orang yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan seluruh admin SKPD sungguh-sungguh dalam proses belajar dan menginput data ke dalam aplikasi Satu Data. Kedepannya perlu menambah wawasan bagi admin Satu Data.

c) *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan sosialisasi Satu Data Tanah Laut ke SKPD di Lingkup Pemkab Tanah Laut.
2. Melaksanakan pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data.
3. Melaksanakan pengembangan dan update aplikasi Satu Data Tanah Laut.
4. Melaksanakan koordinasi terkait program kegiatan bidang statistik dan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Melaksanakan pencetakan Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut.

d) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Statistik hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program pengembangan data/informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.475.000,- dari pagu program Rp 30.795.000,- dengan persentase capaian 95,71 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.320.000,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Pengelolaan Statistik didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Dalam penyusunan data statistik sektoral daerah menggunakan SDM admin seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal pengisian data statistik.
2. Proses pengolahan akhir buku statistik Sektoral dengan melibatkan tenaga kontrak pada internal Dinas Kominfo serta tenaga dari pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh SKPD dalam hal pengisian data dan selaku produsen data yang bertanggung jawab atas data yang diisikan pada aplikasi Satu Data Tanah Laut.

f) *Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Pengelolaan Statistik pada Kegiatan Penyusunan profil daerah dianggarkan pada Triwulan I 10%, Triwulan II 70% dan Triwulan IV 20%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Pengelolaan Statistik pada Kegiatan Penyusunan profil daerah dilaksanakan pada Triwulan I 10%, Triwulan II 70% dan Triwulan IV 20%.

g) *Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Pengelolaan Statistik, diantaranya:

1. Tidak adanya personil/staf pelaksana pada Seksi Pengelolaan Statistik.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis terkait pengelolaan statistik.
3. SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan statistik.
4. Setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Melakukan pengusulan penambahan personil/staf teknis pengelolaan statistik.
2. Peningkatan SDM pegawaiia melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait pengelolaan statistik.
3. Melakukan sosialisasi tentang petunjuk pengisian aplikasi Satu Data Tanah Laut.
4. Peningkatan SDM admin setiap SKPD dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
5. Pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala oleh produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020

#### Ringkasan Realisasi APBD SKPD 2019 dan 2020

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Realisasi			%	Realisasi			%	Peningkatan /Penurunan (%)
		Pagu Tahun 2019	Pagu APBD-P Tahun 2019	Tahun 2019		Pagu Tahun 2020	Pagu APBD-P Tahun 2020	Tahun 2020		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	4		4	5					
1.	<b>PENDAPATAN</b>	471.936.000	471.936.000	447.356.000	94,79	491.200.000	523.128.000	606.694.000	115,97	21,18
1.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	471.936.000	471.936.000	447.356.000	94,79	491.200.000	523.128.000	606.694.000	115,97	21,18
	Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	471.936.000	471.936.000	447.356.000	94,79	491.200.000	523.128.000	606.694.000	115,97	21,18
2.	<b>BELANJA</b>	6.028.126.461,6	6.889.210.326,6	5.987.707.238	86,91	10.431.857.159	8.454.584.720,04	7.403.577.517	87,57	0,66
2.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.377.358.978	3.451.284.867	2.994.924.371	86,78	3.507.904.606	3.364.096.713,04	2.689.041.007	79,93	-6,85
	Gaji dan Tunjangan	1.489.082.278	1.530.508.167	1.348.429.741	88,10	1.691.640.344	1.691.640.344	1.299.406.580	76,81	-11,29
	Tambahan Penghasilan PNS	1.888.276.700	1.920.776.700	1.646.494.630	85,72	1.816.264.262	1.672.456.369,04	1.389.634.427	83,09	-2,63

2.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.650.767.483,6	3.437.925.459,60	2.992.782.867	87,05	6.923.952.553	5.090.488.007	4.714.536.510	92,61	5,56
	Belanja Pegawai	14.856.000	12.756.000	12.006.000	94,12	65.895.000	64.895.000	49.495.000	76,27	-17,85
	Belanja Barang dan Jasa	2.321.163.986	2.308.764.962	1.924.213.047	83,34	2.297.340.158	2.060.820.357	1.809.262.214	87,79	4,45
	Belanja Modal	314.747.497	1.116.404.497	1.056.563.820	94,64	4.560.717.395	2.964.772.650	2.855.779.296	96,32	1,68
	<b>Jumlah</b>	5.556.190.461,6	6.417.274.326,6	5.540.351.238	86,33	9.940.657.159	7.931.456.720,04	6.796.883.517	85,70	-0,63

Gambaran tabel 3.26 tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 ada peningkatan 21,18 % dari tahun 2019, termasuk kekurangan pada tahun 2019 telah menjadi tambahan pendapatan pada tahun 2020. Pada pos belanja tahun ini realisasi penyerapan dananya sebesar Rp. 4.714.536.510 (92,61 %) dengan kenaikan 5,56 % dari belanja tahun 2019 sebesar Rp. 2.992.782.867 (87,05 %).

Tabel 3.27 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
		( Rp. )	( Rp. )	
1	2	4	4	5
1.	<b>PENDAPATAN</b>	523.128.000	606.694.000	83.566.000
1.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	523.128.000	606.694.000	83.566.000
	Pendapatan Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi	523.128.000	606.694.000	83.566.000
2.	<b>BELANJA</b>	8.454.584.720,04	7.403.577.517	(1.051.007.203,04)
2.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.364.096.713,04	2.689.041.007	(675.055.706,04)
	Gaji dan Tunjangan	1.691.640.344	1.299.406.580	(392.233.764)
	Tambahan Penghasilan PNS	1.672.456.369,04	1.389.634.427	(282.821.942,04)
2.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.090.488.007	4.714.536.510	(375.951.497)
	Belanja Pegawai	64.895.000	49.495.000	(15.400.000)
	Belanja Barang dan Jasa	2.060.820.357	1.809.262.214	(251.558.143)
	Belanja Modal	2.964.772.650	2.855.779.296	(108.993.354)
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		7.931.456.720,04	6.796.883.517,00	<b>1.134.573.203,04</b>

Dilihat dari pendapatan yang diperoleh dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 ini mengalami **SILPA** anggaran pembiayaan sebesar **Rp. 1.134.573.203,04,-** (*Satu milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga koma empat rupiah*).

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

- Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
			Rp.	Rp.	
I.	administrasi umum dan kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	792.641.867	749.743.264	94,59 %
II	-	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-
III	-	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-
IV	administrasi umum dan kepegawaian	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	466.754.468	399.599.115	85,61 %
V	administrasi umum dan kepegawaian	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	22.490.000	0	0 %
VI	pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media	3.147.889.600	2.948.483.645	93,67 %

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
	Berbasis Elektronik)	Massa			
VII	-	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	-	-	-
VIII	-	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	-	-	-
IX	penyebaran informasi dan komunikasi publik	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	619.475.472	578.287.986	93,35 %
X	pemanfaatan sandi (keamanan informasi)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.637.600	3.387.600	93,13 %
XI	kualitas pelaporan dan perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	6.804.000	5.559.900	81,72 %
XII	kualitas data statistik sektoral SKPD	Pogram Pengembangan Data/Informasi	30.795.000	29.475.000	95,71 %
VIII	-	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	-	-	-

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
		Jumlah	5.090.488.007	4.714.536.510	92,61 %

- Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.28 : Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

No.	Uraian	Pagu anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.248.160.130,00	995.314.018,00	93,21
2	Tunjangan Keluarga	154.849.214,00	92.318.180,00	77,25
3	Tunjangan Jabatan	147.630.000,00	134.305.000,00	87,13
4	Tunjangan Fungsional	19.600.000,00	1.780.000,00	50,20
5	Tunjangan Fungsional Umum	30.660.000,00	21.850.000,00	81,58
6	Tunjangan Beras	76.041.000,00	48.086.880,00	70,81
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	5.737.589,00	17,85
8	Pembulatan Gaji	700.000,00	14.913,00	2,26
9	Tambahan Penghasilan	1.653.790.769,04	1.389.634.427,00	85,72

	Berdasarkan Prestasi Kerja			
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	18.665.600,00	0,00	0
<b>Jumlah</b>		3.364.096.713,04	2.689.041.007,00	79,93

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

**TABEL 3.25 Tabel dan Realisasi APBD Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>1.014.144.059,6</b>	<b>906.593.485</b>	<b>89,39</b>	<b>792.641.867</b>	<b>749.743.264</b>	<b>94,59</b>
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	41.400.000	39.910.046	96,40	-	-	-
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	34.412.297	26.998.000	78,45	-	-	-
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	57.645.000	28.104.006	48,75	-	-	-
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	13.505.100	9.099.000	67,37	-	-	-
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4.136.500	2.138.000	51,69	-	-	-
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	12.382.920	6.165.000	49,79	-	-	-
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	14.404.000	10.464.500	72,65	-	-	-

1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6.492.500	5.079.320	78,23	-	-	-
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	61.901.100	54.976.000	88,81	-	-	-
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	19684.000	11.274.800	57,28	-	-	-
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	311.771.250	311.718.373	99,98	-	-	-
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Terlaksanakannya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	91.410.000	91.275.000	99,85	-	-	-
1.13	Penyedia rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi	-	-	-	249.300.480	248.135.881	99,53
1.14	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Tersedianya jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	-	-	-	127.665.900	107.289.236	84,04
1.13	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium tenaga ahli dan pegawai tidak tetap/PTT	344.999.392	309.391.440	89,68	415.675.487	394.318.147	94,86
<b>2</b>	<b>Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas sumber Daya Manusia</b>	<b>Terpenuhinya sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>446.754.468</b>	<b>399.599.115</b>	<b>85,61</b>
2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	258.584.210	241.603.840	93,43

2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	88.820.258	39.721.275	44,72
2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	-	-	-	50.350.000	49.689.000	98,69
2.4	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	62.000.000	61.585.000	99,33
2.5	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatur	-	-	-	7.000.000	7.000.000	100,00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>294.450.000</b>	<b>267.800.000</b>	<b>90,95</b>	-	-	-
3.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	294.450.000	267.800.000	90,95	-	-	-
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	45.000.000	0	0	-	-	-
<b>5</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.551.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>60,97</b>	-	-	-
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.551.000	1.556.000	60,97	-	-	-

6	<b>Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD</b>	<b>Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan SKPD</b>	-	-	-	22.490.000	0	0,00
6.1	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan	-	-	-	22.490.000	0	0,00
7	<b>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b>	1.831.628.100	1.645.492.645	89,84	3.147.889.600	2.948.483.645	93,67
7.1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	1.163.000.000	1.086.497.215	93,42	3.028.089.600	2.844.525.495	93,94
7.2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	598.898.100	498.492.430	83,23	-	-	-
7.3	Penyusunan aplikasi sistem informasi	Terlaksananya kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi	69.730.000	60.503.000	86,77	119.800.000	103.958.150	86,78
8	<b>Kerjasama Informasi Dengan Masa Media</b>	<b>Terlaksananya kerjasama informasi dengan masa media</b>	172.809.800	143.889.790	83,26	-	-	-
8.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	0	0	0	-	-	-
8.2	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	172.809.800	143.889.790	83,26	-	-	-

<b>9</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo</b>	<b>Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas kominfo</b>	<b>44.787.500</b>	<b>4.260.197</b>	<b>9,51</b>	-	-	-
9.1	Pemeliharaan menara repeater	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan menara repeater	44.787.500	4.260.197	9,51	-	-	-
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Komunikasi Publik</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan komunikasi publik</b>	-	-	-	<b>619.475.472</b>	<b>578.287.986</b>	<b>93,35</b>
10.1	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya penyebarluasan informasi bagi yang bersifat	-	-	-	589.195.472	562.316.273	95,44
10.2	Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Terlaksananya pengawasan dan pengelolaan sarana dan prasarana telekomunikasi	-	-	-	30.280.000	15.971.713	52,75
<b>11</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan informasi</b>	<b>Terseleenggaranya persandian untuk pengamanan informasi</b>	-	-	-	<b>3.637.600</b>	<b>3.387.600</b>	<b>93,13</b>
11.1	Fasilitasi persandian dan pengamanan informasi	Terlaksananya fasilitasi persandian dan pengamanan informasi	-	-	-	<b>3.637.600</b>	<b>3.387.600</b>	<b>93,13</b>
<b>12</b>	<b>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD</b>	-	-	-	<b>6.804.000</b>	<b>5.559.900</b>	<b>81,72</b>
12.1	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	-	-	-	2.129.400	1.680.900	78,94
12.2	Penyusunan laporan keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan	-	-	-	4.174.600	3.379.000	80,94
12.3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Terlaksananya kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	-	-	-	500.000	500.000	100,00
<b>13</b>	<b>Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan data/informasi</b>	<b>28.054.100</b>	<b>22.215.750</b>	<b>79,19</b>	<b>30.795.000</b>	<b>29.475.000</b>	<b>95,71</b>

13.1	Penyusunan profile daerah	Terlaksananya kegiatan penyusunan profile daerah	28.054.100	22.215.750	79,19	<b>30.795.000</b>	<b>29.475.000</b>	95,71
<b>14</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengembangan pengelolaan asset daerah</b>	<b>4.500.000</b>	<b>975.000</b>	<b>21,67</b>	-	-	-
14.1	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Terlaksananya kegiatan penyusunan tabulasi	4.500.000	975.000	21,67	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			3.007.948.100	2.611.063.235	86,81	5.090.488.007	4.714.536.510	92,61

Dari tabel perbandingan realisasi anggaran capaian Sasaran Strategis Tahun 2019 dengan Tahun 2020 di atas dapat di lihat bahwa belanja langsung tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp 3.007.948.100,- telah terealisasi sebesar Rp 2.611.063.235,- dengan persentase 86,81 % sedangkan pada tahun 2020 dengan pagu anggaran Rp 5.090.488.007,- telah terealisasi sebesar Rp 4.714.536.510 dengan persentase 92,61 %. Dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 5,8 %. Pagu anggaran belanja yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2019, untuk efisiensi dan efektivitas anggaran, beberapa kegiatan difocusing untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurang intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Belum tersedianya Ruang NOC dan ruangan server yang representatif untuk menunjang pengelolaan e-government secara optimal.
5. Koordinasi antar instansi yang belum optimal dalam mendukung terlaksananya implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Pembaharuan data untuk mengetahui daerah-daerah yang masih dalam kondisi *blank spot* sebagai bahan untuk pemberian rekomendasi pembangunan BTS kepada pihak ketiga.
5. Menyediakan Ruang NOC dan Ruang server untuk pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Server aplikasi Pemerintah daerah yang representatif.
6. Melakukan koordinasi secara intensif dengan membentuk tim internal evaluasi mandiri SPBE dalam rangka pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut dengan menyusun jadwal kegiatan evaluasi mandiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan **realisasi fisik 97,87%** dan **realisasi keuangan 92,61 %**, dengan kategori capaian **Sangat Memuaskan**, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan

kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Pembaharuan data untuk mengetahui daerah-daerah yang masih dalam kondisi *blank spot* sebagai bahan untuk pemberian rekomendasi pembangunan BTS kepada pihak ketiga.
5. Memberi dukungan kepada para *leader* untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta

masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah membuat rancangan *road map* pembangunan infrastruktur E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun kedepannya yang meliputi sebagai berikut:

### **1. Tanah Laut *Smart Government* dan *Smart City***

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

### **2. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data.**

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara

pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

### **3. Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah SPBE.**

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan SPBE yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

### **4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.**

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

### **5. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.**

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

Pelaihari,       Maret 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut



**Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si**  
NIP. 19680916 199010 1 001